

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Tempo.co

Tempo.co yang didirikan melalui PT Tempo Inti Media, Tbk. yang lahir pada tahun 1971 yang diprakarsai oleh wartawan muda di kota Jakarta, yaitu founder utamanya Goenawan Muhammad, beserta teman-temannya Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christiano Wibisono.



Gambar 4. 1 Logo Media Tempo.co 2024

Memasuki tahun 1982 Tempo dibredel pada masa orde baru karena dianggap tajam mengkritik kendaraan politik orde baru saat itu yaitu partai Golkar (Golongan Karya). Terdapat juga pelarangan penerbitan majalah tempo pada tahun 1994 yang belum diketahui hingga saat ini. Banyak spekulasi yang beredar saat itu, menteri penerangan mencabut surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) Tempo dikarenakan terlalu tajam tulisan mereka kepada pemerintah sekaligus dianggap mengganggu stabilitas negara. Lalu sekelompok wartawan yang kecewa pada sikap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menyetujui pembredelan tempo, Media Editor dan Detik saat itu langsung mendirikan organisasi bernama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).³²

Pemberitaan Tempo yang pedas dari waktu terkadang membakar hati para politisi, pengusaha, pegawai negeri, dan pegawai negeri. Tempo berulang kali berurusan dengan hukum terkait tuntutan partai politik yang tidak menerima pemberitaan surat kabar tersebut. Salah satunya adalah pengusaha kontroversial

³²Tempo Media Group. 2019. Tempo.co. <https://www.tempo.id/about.php>

Tempo, Tomy Winata.³³ Tuntutan Tomy terkait kabar keterlibatannya dalam kebakaran pasar tekstil Tanah Abang, Jakarta. Dalam artikel Tempo, penyebab kebakaran adalah usulan koreksi pasar Tomy senilai Rp 53 miliar. Tomy menuding tiga jurnalis Time, Bambang Harymurti (Pemimpin Redaksi), Ahmad Taufik, dan T. Iskandar Ali melakukan pencemaran nama baik..

Nama Tempo dipilih karena, pertama, namanya singkat dan sederhana, mudah diucapkan oleh masyarakat Indonesia dari segala penjuru. Kedua, nama terdengar netral, tidak mengagetkan atau menggairahkan. Ketiga, nama bukan merupakan simbol maupun grup. Dan alasan yang terakhir adalah arti sederhana dari kata “Tempo” yang artinya waktu, Kesederhanaan makna ini juga menjadi alasan mengapa sebuah kata dengan arti yang sama digunakan di banyak publikasi di negara lain selain nama majalah.³⁴ Artinya, sama dengan waktu, dengan segala variasinya, yang lazim digunakan oleh banyak media pers di seluruh dunia. Tempo merupakan majalah mingguan yang rubriknya (lebih dari 30 rubrik) selalu mengedepankan berita terkini dengan tujuan agar selalu akurat dan terkini. Pelaporan dilakukan secara jujur dan juga harus berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Waktu bergerak secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain baik personal maupun institusi. Waktu adalah wadah yang memperjuangkan hak berbicara bagi semua orang atau lembaga tanpa terkecuali. Tempo edisi pertama terjual sekitar 10.000 eksemplar. Edisi kedua terjual sekitar 15.000 eksemplar. Tempo meningkat hingga pada tahun kesepuluh peredarannya, Tempo mencapai 100.000 eksemplar. Masa kejayaan Tempo terjadi pada tahun 1980an, ketika anggaran iklan banyak perusahaan dialokasikan ke media cetak.

³³Sejarah Majalah Tempo: Konflik dan Pembredelan. 2011. Kompasiana.com.
<http://sejarah.kompasiana.com/2011/01/07/sejarah-majalah-tempo-konflik-dan-pembredelan/>

³⁴Sopian, Agus. Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009). hal. 95

B. Visi dan Misi Tempo.co

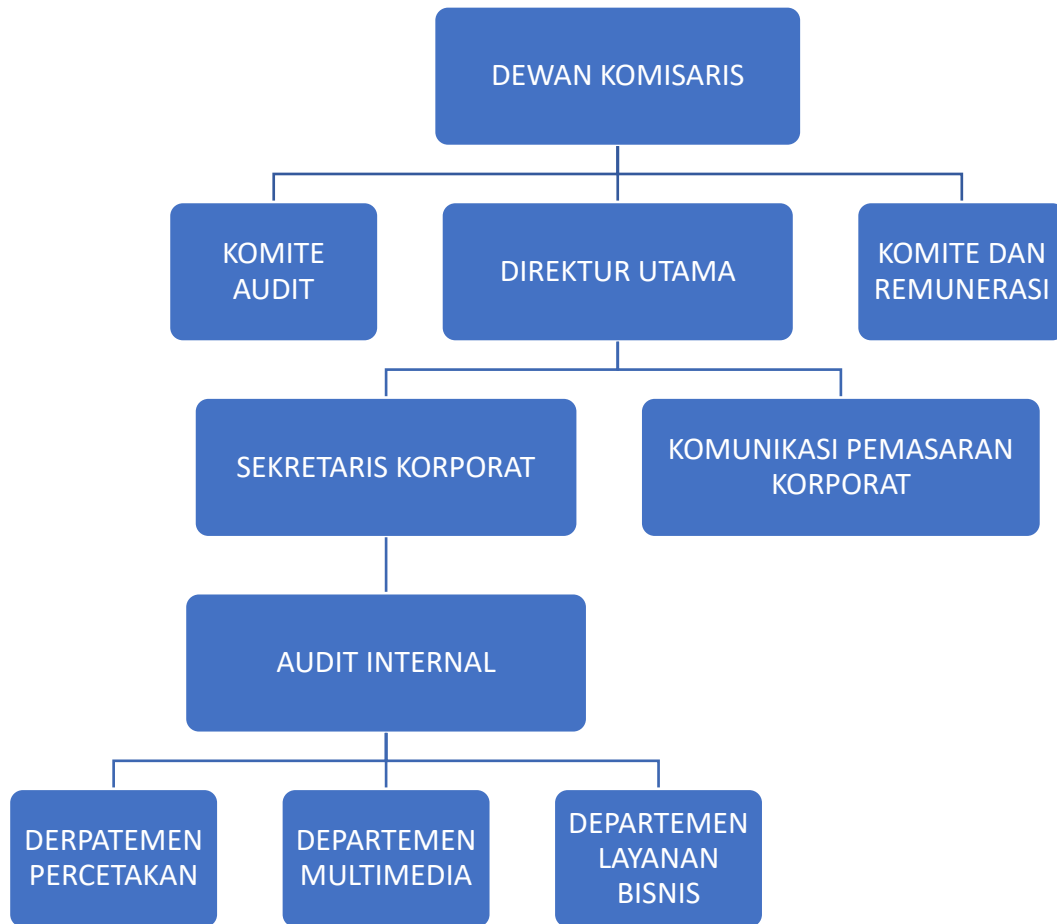
i. Visi:

Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.

ii. Misi:

- a) Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.
- b) Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.
- c) Menjadi tempat kerja yang sehat dan mensejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia
- d) Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.
- e) Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
- f) Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.

C. Struktur Organisasi Tempo.Co



D. (Tabel B) Diagram Perusahaan Tempo.co

TEMPO.CO			
Media	Kreatif dan Riset	Percetakan dan Niaga	Layanan Bisnis
1. Majalah Tempo 2. Koran Tempo 3. Tempo <i>English</i> 4. Tempo.co	1. Matair dan Impesario 2. Tempo Institute 3. Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT) 4. TV Tempo	1. Temprint Inti Niaga (TIN) 2. Temprint Graha Delapan	1. Keuangan 2. Sumber Daya Manusia 3. Teknologi

E. (Tabel C) Redaksi Tempo

TEMPO.CO (PT Info Media Digital)	Koran Tempo	Majalah Tempo
Direktur Utama: Wahyu Dhyatmika. Direktur: Y Tomi Aryanto, Ade Liesnari, Handy Dharmawan. Pemimpin Redaksi: Anton Aprianto Redaktur Eksekutif: Anton Septian Koordinator kanal Vertikal: Anton Septian	Pemimpin Redaksi: Jajang Jamaludin. Pemimpin Eksekutif: Yandhrie Arvian.	Pemimpin Redaksi: Setri Yasra Pemimpin Eksekutif: Bagja Hidayat

<p style="text-align: center;">NASIONAL DAN HUKUM</p> <p>Kepala: Juli Hantoro. Redaktur: Linda Novi ,Trianita, Amirullah, Eko Ari Wibowo, Febriyan. Staf Redaksi: Julnis Firmansyah. Reporter: Eka Yudha Saputra, Ade Ridwan Yandwiputra, Tika Ayu, Ima Dini Shafira.</p>	<p style="text-align: center;">NASIONAL DAN HUKUM</p> <p>Kepala: Agoeng Wijaya Redaktur Utama: Rusman Paraqbueq. Redaktur: Sukma Loppies Staff Redaksi: Avit Hidayat, Imam Hamdi. Reporter: Jihan Ristiyani, Andi Adam Faturahman, Hendrik Yaputra.</p>	<p style="text-align: center;">NASIONAL DAN HUKUM</p> <p>Kepala: Stefanus Pramono. Redaktur Utama: Mustafa Silalahi, Raymundus Rikang. Redaktur: Riky Ferdianto, Husein Abri Dongoran. Staff Redaksi: Egi Adyatama, Fajar Pebrianto, Francisca Christy Rosana.</p>
<p style="text-align: center;">EKONOMI DAN BISNIS</p> <p>Kepala: Rr. Ariyani. Redaktur: Agung Sedayu, Martha Warta Silaban. Staff Redaksi: Ali Akhmad Noor Hidayat. Reporter: Moh. Khoiry Alfarizi, Riani Sanusi Putri, Riri Rahayuningsih,</p>	<p style="text-align: center;">EKONOMI DAN BISNIS</p> <p>Kepala: Efri Ritonga. Redaktur: Kodrat Setiawan, Praga Utama. Staff Redaksi: Ghoida Rahmah, Vindry Florentin, Yohannes Paskalis, Caesar Akbar.</p>	<p style="text-align: center;">EKONOMI DAN BISNIS</p> <p>Kepala: Fery Firmansyah. Redaktur: Retno Sulistyawati, Khairul Anam, Aisha Shaidra.</p>

Amy Heppy, Amelia Rahima Sari.		
INTERNASIONAL Kepala: Dewi Rina. Redaktur: Daniel A Fajri.	URBAN Kepala: Reza Maulana. Redaktur: Suseno. Staff Redaksi: Frinski Riana, Indra Wijaya. Reporter Ilona Estherina.	INTERNASIONAL DAN WAWANCARA Kepala: Kurniawan. Redaktur: Abdul Manan.
SAINS, SPORT DAN OTOMOTIF Kepala: Nurdin Saleh. Redaktur: Sunudyantoro, Devy Ernis, Rina Widiastuti, Wawan Priyanto. Staff Redaksi: Erwin Prima, Arkhelaus Wisnu. Reporter: Dicky Kurniawan, Randy Fauzi Febriansyah.	SENI Redaktur: Mustafa Ismail.	KOLOM Kepala: Dodi Hidayat.
METRO		SENI DAN SELINGAN

<p>Kepala: Zacharias Wuragil.</p> <p>Redaktur: Clara Maria Tjandra Dewi.</p> <p>Staff Redaksi: Ahmad Faiz, Lani Diana, Muhammad Iqbal.</p> <p>Reporter: M. Faiz Zaki, Mutia Yuantisya, Desty Luthfiani.</p>		<p>Kepala: Seno Joko</p> <p>Redaktur Utama: Nurdin Kalim</p> <p>Staff Redaksi: Dian Yuliastuti</p> <p>Reporter: Yosea Arga Pramudita</p>
<p>GAYA HIDUP. SELEB. TRAVEL DAN DIFABEL</p> <p>Kepala: Istiqomah Hayati.</p> <p>Redaktur: Mitra Tarigan.</p> <p>Staff Redaksi: Ninis Chairunnisa, Mila Novita, Cheta Nilawaty, Yunia Pratiwi.</p> <p>Reporter: Marvela.</p>		<p>INVESTIGASI</p> <p>Redaktur: Erwan Hermawan</p>

F. Media Sosial Tempo.co

- i. Instagram : @tempodotco
@majalah.tempo
@koratempodigital
- ii. Twitter / X : @tempodotco
@temponewsroom

- iii. Facebook : @korantempo
:Tempo Media
Majalah Tempo
Koran Tempo
- iv. Tiktok : @tempo.co
- v. Threads : tempodotco

G. Alamat Tempo.co

- i. Alamat : Gedung Tempo Media, Jl. Palmerah Barat No.8,
Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, 12210
- ii. Telepon : [62-21-5360409](tel:62-21-5360409) / [7255625](tel:7255625) / [5482132](tel:5482132)
- iii. Fax : 62-21-7206995
- iv. Email Redaksi : redaksi@tempo.co.id

H. (Tabel D) Perbedaan Majalah Tempo, Koran Tempo, dan Tempo Data Science

Majalah Tempo	Koran Tempo	Tempo Data Science
1. Disajikan dalam format majalah mingguan dengan layout visual dan mendalam. Artikelnya seringkali dilengkapi dengan foto-foto berkualitas tinggi.	1. Disajikan dalam format surat kabar harian, dengan tampilan yang lebih sederhana dan langsung. Beritanya lebih ringkas dan pendek.	1. Disajikan dalam format digital yang mengandalkan analisis data dan visualisasi untuk mengungkapkan tren dan wawasan.
2. Diterbitkan setiap minggu.	2. Diterbitkan setiap hari.	2. Tidak memiliki frekuensi penerbitan tetap, tergantung pada situasi di lapangan pada analisis data tersebut.
3. Menyediakan laporan investigatif, feature, dan	3. Menyajikan berita harian yang cepat dan	

<p>artikel analisis mendalam mengenai isu-isu penting dan kompleks.</p> <p>4. Ditujukan kepada pembaca yang mencari analisis mendalam dan laporan investigatif.</p> <p>5. Menggunakan pendekatan feature yang naratif dan deskriptif.</p> <p>6. Beredar secara mingguan melalui toko buku, kiosk majalah, dan langganan.</p>	<p>responsif terhadap kejadian terbaru, mencakup berbagai berita politik, ekonomi, sosial, dan olahraga.</p> <p>4. Ditujukan kepada pembaca yang memerlukan informasi harian tentang berita terbaru.</p> <p>5. Menggunakan pendekatan berita yang straightforward, faktual, dan to the point.</p> <p>6. Beredar secara harian dan tersedia di berbagai tempat, termasuk kios koran dan langganan.</p>	<p>3. Fokus pada analisis data dan visualisasi untuk memberikan wawasan mendalam tentang berbagai isu, menggunakan metode ilmiah dan statistik.</p> <p>4. Ditujukan kepada pembaca yang tertarik pada analisis data dan visualisasi mendalam, termasuk profesional, akademisi, dan penggemar data.</p> <p>5. Menggunakan pendekatan berbasis data dengan analisis statistik dan visualisasi.</p> <p>6. Distribusi utamanya melalui platform digital.</p>
--	---	--

I. Majalah Tempo

“DINASTI TIADA HENTI”

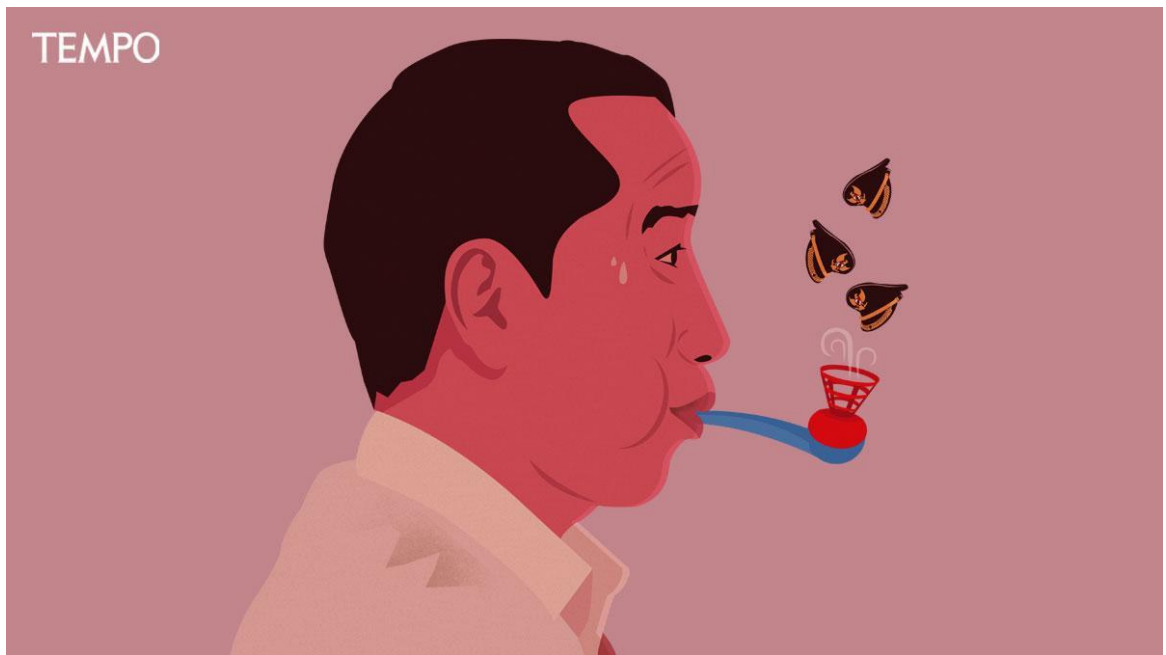


Gambar 4. 2 Cover Majalah Tempo Edisi Minggu, 12 Mei 2024

BAGAIMANA JOKOWI MEMBUKA JALAN BAGI ORANG DEKATNYA BERLAGA DALAM PILKADA 2024 ?

Ditulis Oleh:

Francisca Christy Rosana, Erwan Hermawan, Raymundus Rikang, Egi Adyatama, Hussein Abri Dongoran, Daniel A. Fajri, Jamal A. Nashr, Septia Ryantie, Hanaa Septiana, M.A. Mudarto, dan Mei Leandha.



Gambar 4. 3 Ilustrasi: Tempo/Munzie Fadly

Bangunan Omah Londo di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terlihat ramai pada Kamis siang, 9 Mei 2024. Belasan orang berkumpul di rumah yang kerap digunakan sebagai tempat pameran batik Lasem itu. Kini rumah itu menjadi salah satu markas pemenangan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024.

Sebuah mobil Toyota Avanza silver terparkir di halaman rumah. Di kaca belakangnya tertempel stiker bertulisan huruf kapital "Tim Media Sosial Kapolda Jateng". Sejumlah foto dan karikatur Ahmad Luthfi berseragam polisi pun melekat di mobil berpelat nomor B-1194-EFS itu.

Sebuah mobil bak terbuka lalu memasuki halaman rumah. Bertulisan "Polsek Lasem", mobil itu membawa batang-batang bambu. Orang-orang di dalam

rumah keluar dan mengangkut bambu. Setelah muatan diturunkan, mobil itu meninggalkan Omah Londo. Orang-orang di dalam memasang bendera merah-putih pada ujung bambu dan menegakkannya di kiri - kanan halaman.



Gambar 4. 4 Sejumlah Kendaraan Terpakir di Rumah Pemenangan Ahmad Lutfi, Jalan Untung Suropati, Rembang, Jawa Tengah, 9 Mei 2024. Tempo/Jamal Al Nashr

Ditemui Tempo di sela-sela aktivitas, mereka yang berada di sekitar rumah mengaku tergabung dalam "Komunitas Sedulure Bapak Ahmad Luthfi". Anggota relawan, Suparno Gusno, mengatakan mereka mendukung Luthfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. "Anggota kami 50 orang. Ada yang pedagang kaki lima, tukang ojek, masyarakat kecil," katanya.

Suparno menyatakan para relawan menyewa rumah di pinggir pantai utara Jawa itu hingga Desember mendatang atau sebulan setelah pilkada digelar pada 27 November 2024. Namun Tempo mendapatkan informasi bahwa Kepala Kepolisian Resor Rembang Ajun Komisaris Besar Suryadi punya andil dalam penyewaan rumah tersebut.

Suryadi pun ditengarai telah melaporkan penyewaan rumah untuk markas pemenangan itu kepada Ahmad Luthfi. Dimintai tanggapan melalui sambungan telepon pada Kamis, 9 Mei 2024, Suryadi mengaku hanya melaporkan situasi di sekitar Kabupaten Rembang. Ia pun membantah jika disebut membantu penyewaan griya itu.

Menurut Suryadi, harga sewa rumah berluas lebih dari seribu meter persegi itu mencapai miliaran rupiah. "Rumah itu murni disewa relawan," ucap Suryadi.

Tanda-tanda Ahmad Luthfi bakal maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah terlihat di berbagai daerah di provinsi itu. Sekitar 50 meter dari Omah Londo, baliho bergambar wajah Luthfi terpacak di depan kantor Kepolisian Sektor Lasem. Potret Luthfi memenuhi hampir setengah baliho bertulisan "Polda Jateng Hadir" itu.

Baliho serupa terpasang di banyak tempat di Jawa Tengah. Di Jalan Merdeka Timur, Kabupaten Boyolali, papan dengan foto Luthfi mengenakan seragam polisi terpasang di depan Boulevard Soekarno. Sedangkan papan reklame Luthfi mengucapkan selamat Idul Fitri terpampang di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Sukoharjo, dan Jalan Bhayangkara, Kota Solo.

Siapa pemasang baliho-baliho itu? Seorang perwira menengah di Jawa Tengah mengaku diperintahkan atasannya mencetak dan memasang baliho berfoto Luthfi di tempat-tempat strategis menjelang Lebaran. Misalnya perempatan jalan, jalan utama, jalan provinsi, dan jalan di dekat pusat-pusat belanja.

Polisi itu juga mendapat instruksi mencetak stiker wajah Luthfi dan membagi-bagikannya kepada warga serta tokoh masyarakat. Dua pejabat pemerintah, salah satunya kepala daerah di Jawa Tengah, menyebutkan Luthfi mendekati tokoh-tokoh agama melalui sejumlah utusannya. Mereka meminta para tokoh agama mendukung Luthfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.

Senyampang dengan maraknya baliho Luthfi, sejumlah lembaga survei menampilkan nama lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela tahun 1989 itu. Hasil survei Kanigoro Network yang dirilis pada akhir Maret 2024 menyebutkan elektabilitas Luthfi 25,1 persen, melampaui tingkat keterpilihan mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Menurut survei tersebut, elektabilitas Hendrar 23,8 persen.

Ditemui di Polres Boyolali pada Rabu, 8 Mei 2024, Ahmad Luthfi enggan memberikan tanggapan soal rencananya maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. "Tidak, tidak," kata bekas Kepala Kepolisian Resor Kota Solo itu.

Mengapungnya nama Ahmad Luthfi dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah ditengarai melibatkan Presiden Joko Widodo. Kepada sejumlah orang dekatnya, Luthfi mengaku mendapat instruksi dari Jokowi untuk bersiap menjadi calon gubernur. Para narasumber yang mendengar informasi tersebut dari Luthfi bercerita, pembicaraan itu berlangsung di Solo pada sekitar Maret 2024 atau sebelum Lebaran.

Jokowi awalnya bertanya kepada Luthfi apakah tertarik memimpin Jawa Tengah. Presiden lantas meminta Luthfi mulai membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh politik untuk mendapatkan tiket dalam pilkada 2024. Jokowi pun meminta Luthfi menaikkan elektabilitas dengan menampilkan diri di tengah masyarakat.



Gambar 4. 5 Presiden Jokowi Disambut Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Semarang, Jawa Tengah, Januari 2024. BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Narasumber yang sama mengatakan Jokowi mengingatkan Luthfi soal beratnya pilkada Jawa Tengah. Sejak 1998, calon yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu memenangi pilkada di Jawa Tengah. Kini ada dua kandidat kuat calon gubernur dari PDIP, yaitu Ketua PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto dan bekas Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Empat kolega Luthfi bercerita bahwa Jokowi akan membantu dia agar mengantongi rekomendasi dari partai politik. Jokowi ditengarai telah meminta suksesornya yang juga Ketua

Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendukung Luthfi. Jokowi pun menyarankan kepada Prabowo agar Ketua Gerindra Jawa Tengah Sudaryono dijadikan calon wakil gubernur.

Sudaryono berniat maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Dua orang dekatnya menyampaikan bahwa orang kepercayaan Prabowo itu telah berkeliling Jawa Tengah selama tiga bulan untuk mengerek elektabilitas. Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, dalam laporan yang dirilis pada 28 April 2024, menunjukkan Sudaryono memiliki elektabilitas 19,1 persen.

Kepada Tempo, Sudaryono menyatakan sudah mendapat perintah langsung dari Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur. "Gerindra mem prioritaskan kader internal," ujar Sudaryono melalui pesan suara, Jumat, 10 Mei 2024.

Namun Sudaryono belum pasti menjadi calon gubernur. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo telah meminta Sudaryono membantu di tingkat pusat. "Tapi bukan sebagai menteri," kata Dasco, Jumat, 10 Mei 2024. Namun Dasco membantah informasi bahwa permintaan itu muncul lantaran Gerindra tak mau bersaing dengan Jokowi di Jawa Tengah. "Tidak benar."

Tak berhenti di Gerindra, Ahmad Luthfi juga mendekati partai lain, seperti PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar. Tiga narasumber yang mengetahui manuver itu mengatakan Luthfi telah memanggil Ketua PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi ke rumah dinas nya tiga hari sebelum Lebaran. Luthfi memberikan tawaran agar Hendrar mau menjadi calon wakil gubernur.

Tim Luthfi bahkan menjamin bantuan logistik jika keduanya berduet. Hendi-panggilan Hendrar-membenarkan adanya pertemuan itu. Ia pun tak membantah jika disebut diajak berkoalisi. Namun Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu tak memberikan jawaban. "Saya kader PDIP, keputusan ada di tangan Ketua Umum," ucapnya melalui pesan pendek, Jumat, 10 Mei 2024.

Pun kepada Ketua PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori, Luthfi memberikan tawaran serupa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku mendapat informasi dari Yusuf soal ajakan Luthfi itu pada Jumat, 3 Mei 2024.

Muhaimin berpesan agar Yusuf tetap maju sebagai calon gubernur dan tak menerima tawaran itu.

"Saya bilang ke Gus Yusuf, kalau hanya cawagub tidak usah. Kasih orang lain saja," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu kepada Tempo di rumah dinasnya, Senin, 6 Mei 2024. Adapun Yusuf mengatakan partainya akan mengusung calon gubernur dari kalangan internal. PKB hanya perlu berkoalisi dengan satu partai lagi untuk maju dalam pilkada.

Mendekati Golkar, Luthfi mengajak Bupati Kendal Dico Ganinduto berduet. Dico telah mendapat restu dari partainya untuk menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. "Saya ditugasi Ketua Umum Golkar untuk berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Pak Kapolda," tuturnya, Jumat, 10 Mei 2024.

Dukungan Presiden untuk Luthfi tak lepas dari kedekatan mereka. Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada 2011, Luthfi menjabat Wakil Kapolresta Surakarta. Dua koleganya menuturkan, Luthfi kerap menemani Jokowi makan siang. Pada 2020, Luthfi pun menjabat Kepala Polda Jawa Tengah.

Penunjukan Luthfi menimbulkan kasak-kusuk di lingkup internal Kepolisian RI. Sebab, Luthfi bukan lulusan Akademi Kepolisian. Umumnya kepala kepolisian daerah dijabat oleh lulusan Akpol. Ia pun tercatat sebagai Kapolda Jawa Tengah terlama.

Dalam pemilihan presiden 2024, Luthfi diduga membantu kemenangan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Penelusuran Tempo menunjukkan Luthfi ditengarai memerintahkan anak buahnya.

Luthfi akan purna tugas pada akhir 2024. Tiga koleganya menyebutkan Istana menyiapkan tambahan bintang di pundak Luthfi sebelum pilkada 2024 digelar. Luthfi tak merespons pesan pendek dan panggilan telepon Tempo hingga Jumat, 10 Mei 2024. Ia juga tak menjawab surat permintaan wawancara yang dikirim Tempo.

Presiden Jokowi menyebutkan niat Luthfi maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah merupakan keinginan pribadi. "Tolong ditanyakan kepada yang

bersangkutan. Jangan sedikit-sedikit urusan pilkada ditanya ke saya," kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2024.

Menemui Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2024 di Istana Bogor, Jawa Barat, Ketua Tim Asisten Pribadi Iriana, Sendi Fardiansyah, menyampaikan niatnya maju sebagai calon Wali Kota Bogor. Sendi membawa beberapa lembar hasil survei yang ia gelar secara mandiri. Survei itu menunjukkan elektabilitas Sendi berada di urutan ketiga dalam simulasi nama calon terbuka. Sigi itu menunjukkan Sendi masih tertinggal dari Dedie Abdu Rachim-calon Wali Kota Bogor inkumben-dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Bogor Atang Trisnanto. "Presiden mengatakan hasil survei saya masih kurang," ujar Sendi saat ditemui Tempo di Kota Bogor, Kamis, 9 Mei 2024. Menurut Sendi, Jokowi menyarankan dia lebih sering blusukan.

Selain itu, Jokowi berpesan agar Sendi rutin memantau hasil survei sampai Agustus 2024 atau sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Presiden pun mempersilahkan Sendi maju dalam pilkada 2024 jika elektabilitasnya meningkat.



Gambar 4. 6 Ketua Tim Asisten Pribadi Iriana Jokowi, Sendi Fardiansyah, Bogor, Jawa Barat, 31 Maret 2024. Dok Pribadi.

Sebelum menghadap Jokowi, Sendi meminta restu kepada ibu negara. Iriana menyarankan Sendi berdiskusi dengan suaminya. Setelah mendapat lampu hijau dari keluarga Istana, Sendi bermanuver meningkatkan elektabilitas. Akhir

Maret 2024, ia memasang baliho bergambar wajahnya di jalan-jalan utama Kota Bogor, termasuk jalan yang dilalui Jokowi.

Pada Ahad, 5 Mei 2024, Sendi mendaftar sebagai calon kepala daerah lewat Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Dengan Gerindra, ia mengaku telah bertemu dengan Prabowo Subianto pada Agustus 2023 untuk meminta dukungan. "Pak Prabowo meminta saya mencermati hasil survei."

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Bogor Pepen Firdaus bercerita, partainya belum memutuskan melabuhkan dukungan kepada Sendi. Gerindra akan memprioritaskan kader internal sebagai calon wali kota. "Di lingkup internal Gerindra, ada dua orang yang mendaftar sebagai calon Wali Kota Bogor," tutur Pepen saat dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2024.

Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata juga mengatakan partainya belum memutuskan nama calon yang akan maju dalam pemilihan. Ia menunggu rekomendasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk urusan calon kepala daerah. Nantinya PDIP akan menggelar seleksi untuk para calon kepala daerah.

Seorang petinggi PDIP menyebutkan partainya sulit memberi rekomendasi kepada orang-orang dekat Jokowi. Sebabnya, Jokowi dianggap berkhianat karena mendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Rusaknya hubungan itu diperkirakan membuat orang dekat keluarga Solo sulit mendapat rekomendasi dari PDIP.

Sendi mengaku berniat menjadi Wali Kota Bogor sejak 2020. Ia mendiskusikan rencananya itu dengan bekas asisten pribadi Jokowi, Anggit Nugroho. Mulai tahun lalu, Sendi meminta dukungan sejumlah tokoh politik lewat istri-istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE yang dibentuk Iriana Jokowi.

Lewat Yanti Airlangga, istri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Sendi mengaku dipertemukan dengan Ketua Umum Golkar itu. Sendi meminta dukungan partai beringin. Menurut Sendi, Airlangga menyampaikan

dukungannya kepada Iriana di Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2023. Airlangga tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo hingga Jumat, 10 Mei 2024.

Bekerja sekitar sembilan tahun dengan Iriana, Sendi dianggap sebagai orang dekat keluarga Solo. Pada 2012, ketika Jokowi memimpin Ibu Kota, Sendi yang bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membantu membersihkan kantor Gubernur DKI Jakarta dari aktivitas penyadapan. Setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi meminta BSSN mengirim Sendi sebagai asisten Iriana.

Selain Sendi, orang dekat Jokowi yang masuk bursa calon kepala daerah adalah Devid Agus Yunanto. Tiga orang dekatnya mengatakan Devid didorong menjadi calon Bupati Boyolali. Di sana baliho Devid pun bertebaran. Utje Gustaaf Patty, Ketua Umum Bara JP, kelompok relawan pendukung Jokowi, mengatakan baliho dan spanduk itu dipasang oleh relawan.

"Kami sempat mengusulkan Mas Devid untuk maju di Boyolali," kata Uje saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. Namun tiga narasumber yang dekat dengan keluarga Solo menyatakan Istana menyarankan Devid tak maju di Boyolali, yang dikuasai oleh PDIP. Partai banteng menguasai 38 dari total 45 kursi dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten itu. Nama Devid belakangan meredup. Dua orang dekatnya mengatakan Devid telah mendapat tugas baru sebagai asisten pribadi presiden menggantikan Anggit Nugroho. Devid membantah bila disebut berniat maju sebagai calon kepala daerah. "Saya tak pernah mencalonkan diri dan tak pernah mendeklarasikan maju sebagai calon Bupati Boyolali," ucapnya melalui pesan pendek.

Calon kepala daerah yang juga mendapat dukungan penuh Presiden Joko Widodo adalah Khofifah Indar Parawansa. Dua orang dekat bekas Gubernur Jawa Timur itu menuturkan, Jokowi sudah meminta Khofifah berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2024. Pesan itu juga disampaikan lewat Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Pratikno tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo.

Khofifah juga mendapat sokongan dari partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam pemilihan presiden 2024, Khofifah mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo-Gibran. "Komunikasi di lingkup

internal Koalisi Indonesia Maju sangat solid untuk Jawa Timur," kata Sekretaris Badan Pemilihan Umum Demokrat Jawa Timur Dedi Irwansa, Kamis, 9 Mei 2024.

Orang dekat Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bekas presiden itu ikut mendukung Khofifah. Dalam pertemuan di Malang, Jawa Timur, sebelum kampanye Prabowo-Gibran pada 1 Februari 2024, Yudhoyono bertemu dengan Khofifah. Yudhoyono menyatakan Istana dan partai koalisi bersepakat mendukung bekas Menteri Sosial itu. Pun Gerindra berancang-ancang mendukung Khofifah. "Sudah ada perintah dari Dewan Pengurus Pusat Gerindra," tutur Ketua Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad. Sedangkan Khofifah enggan berkomentar saat dihubungi melalui pesan pendek pada Jumat, 10 Mei 2024. Di Sumatera Utara, menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, berancang-ancang maju sebagai calon gubernur. Wali Kota Medan itu telah mendekati sejumlah partai untuk mendapatkan tiket maju sebagai calon gubernur. Setelah tak lagi menjadi kader PDIP, Bobby harus mencari partai yang mau mengusungnya menjadi calon gubernur.



Gambar 4. 7 Presiden Jokowi Widodo Bersama Bobby Nasution Mengecek Penataan Kota Medan, Sumatera Utara, Februari 2023, BPMI/Setpres/ Laily Rachev.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendengar kabar bahwa Bobby telah berkomunikasi dengan pengurus partai di Sumatera

Utara. "Tapi Bobby belum mendaftar kepala daerah lewat PKB," kata Muhaimin kepada Tempo, Senin, 6 Mei 2024.

Bobby pun telah melobi pengurus Golkar. Namun timbul penolakan dari kalangan internal partai karena Golkar berencana mengusung mantan wakil gubernur Musa Rajekshah sebagai calon gubernur. Di tengah penolakan itu, pada April 2024, Jokowi lima hari berada di Medan. Seorang kerabat Bobby mengatakan salah satu agenda Jokowi adalah menyelesaikan persoalan menantunya. Orang dekat Bobby, Ade Jona Prasetyo, enggan berkomentar soal agenda Jokowi di Medan. "Saya tidak mencampuri urusan keluarga sejauh itu," ucapnya saat dihubungi pada Jumat, 10 Mei 2024.

Belakangan, Bobby disebut-sebut mendekati Gerindra melalui Ade Jona, yang juga politikus partai itu. Istana pun disebut-sebut mendukung Bobby maju lewat Gerindra. Ade Jona enggan menanggapi ihwal perannya dalam pencalonan Bobby Nasution. "Saya dekat dengan Gerindra dan Bobby, jadi mungkin orang beranggapan saya adalah jembatannya," ujar Ade.

CAWE-CAWE SEPANJANG JALAN

CAWE-CAWE Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2024 kembali terlihat pada pemilihan kepala daerah 2024. Ia merestui sejumlah orang dekatnya menjadi calon kepala daerah. Jokowi bahkan ditengarai membantu mencari tiket agar bisa menjadi kontestan.



ORANG JOKOWI DI PILKADA

1. MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION (32 TAHUN)

Wali Kota Medan (2021-2024)

Hubungan dengan Jokowi: menantu

Berniat menjadi calon Gubernur Sumatera Utara

Kekayaan: RP 55,9 MILIAR

Pendidikan:
 • Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, 2009
 • Magister Manajemen dan Bisnis IPB 2015

Elektabilitas:
 Versi Charta Politika, Juni 2022
 29%

“Dari Sumatera Utara saya rasakan untuk calon gubernur kan bukan cuma saya sendiri.”

Bobby Nasution,
 6 April 2024.

3. SENDI FERDIANSYAH (35 TAHUN)

Sekretaris pribadi Iriana Jokowi

Hubungan dengan Jokowi: sekretaris pribadi istri Jokowi sejak 2015

Berniat menjadi Wali Kota Bogor

Pendidikan:
 • D-4 Manajemen Persandian Sekolah Tinggi Sandi Negara, lulus 2011
 • Magister manajemen Universitas Mercu Buana, Jakarta, lulus 2015

2. AHMAD LUTHFI (57 TAHUN)

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (sejak 2020)

Hubungan dengan Jokowi: disebut sebagai bagian dari geng Solo karena dekat dengan Jokowi sejak bertugas di Kepolisian Resor Kota Surakarta pada 2011

Berniat menjadi calon Gubernur Jawa Tengah

Kekayaan: RP 9,7 MILIAR

Pendidikan:
 • Sekolah Perwira Militer Sukarela 1989
 • Sekolah Lanjutan Perwira Polri 2000
 • Sekolah Staf dan Pimpinan Polri 2005

Elektabilitas:
 Versi Kanigoro Network, Mei 2024
 25,1%

4. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA (58 TAHUN)

Mantan Gubernur Jawa Timur

Hubungan dengan Jokowi: pernah menjadi Menteri Sosial, ikut mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Berniat maju lagi sebagai calon Gubernur Jawa Timur

Kekayaan: RP 25,09 MILIAR

Pendidikan:
 • Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 1984-1991
 • Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 1993-1997

Elektabilitas:
 Versi Accurate Research and Consulting Indonesia, Januari 2024
 38,6%

NASKAH: ERWAN HERMAWAN | FOTO: DOK. PEMKO MEDAN, HUMAS.POLRI.GO.ID, INSTAGRAM @SENDIFERDIANSYAH, DOK. TEMPO/STR/ARIS NOVIA HIDAYAT | SUMBER: TEMPO.CO, INDONESIA CORRUPTION WATCH, LAPORAN HARTA, KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, WAWANCARA, BERBAGAI SUMBER

Gambar 4. 8 Infografis Tempo Cawe - Cawe Sepanjang Jalan.

Cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam pemilihan kepala daerah 2024 bukan hanya soal dukungan terhadap calon tertentu. Istana juga diduga berupaya mengubah waktu pelaksanaan pilkada dua bulan lebih cepat atau pada September 2024. Dengan begitu, pilkada 2024 digelar saat Jokowi masih menjabat presiden.

Istana lewat Kementerian Dalam Negeri sempat mengusulkan perubahan itu melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dua anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat bercerita, upaya itu dilancarkan saat Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat tertutup dengan para politikus Senayan di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada pertengahan September 2023.

CAWE-CAWE JOKOWI DI PILKADA DAN PILPRES

- Membuka jalan bagi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan memenangkannya menjadi calon Wali Kota Solo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- Mengerahkan lembaga negara untuk memenangkan menantunya, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan.
- Diduga berada di belakang putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah bagi Gibran menjadi calon wakil presiden.
- Disinyalir membagikan bantuan sosial secara masif untuk membantu kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
- Ditengarai berencana memajukan jadwal pemilihan kepala daerah dari November ke September 2024.
- Memberikan restu kepada orang-orang di sekelilingnya untuk maju dalam pilkada 2024.
- Diduga membantu mencarikan tiket pilkada untuk orang-orang kepercayaannya.

DAERAH INCARAN JOKOWI DAN KOALISI PRABOWO

Sumatera Utara
Calon: **Bobby Nasution**

Jawa Timur
Calon: **Khofifah Indar Parawansa**

Kota Solo
Calon: **belum diketahui**

Jakarta
Calon: **belum diketahui**

Jawa Barat
Calon: **Ridwan Kamil**

Jawa Tengah
Calon: **Ahmad Luthfi**



"Itu keinginan pribadi, tolong ditanyakan kepada partai atau kepada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusan pilkada tanyakan ke saya, gimana?"

Presiden Joko Widodo, 8 Mei 2024.

FOTO:
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Gambar 4. 9 Infografis Tempo Cawe - Cawe Jokowi di Pilkada dan Pilpres Serta Daerah Incaran Jokowi dan Koalisi Prabowo.

Dalam rapat itu, pejabat Kementerian Dalam Negeri menyampaikan salah satu klausul dalam revisi UU pilkada adalah percepatan waktu pencoblosan dari November menjadi September 2024. Alasannya, jika pilkada berlangsung pada November, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif di 545 daerah di Indonesia pada 1 Januari 2025.

Pembahasan itu berlanjut dalam rapat kerja di DPR pada 20 September 2023. Dilaksanakan secara terbuka, rapat yang berjalan hingga tengah malam itu merembukkan sejumlah konsekuensi jika waktu pelaksanaan pilkada dipercepat. Penolakan pun muncul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Seorang petinggi PKS menyebutkan penolakan didasarkan pada peluang Jokowi cawe-cawe jika pelaksanaan pilkada dipercepat. Apalagi ada dua anggota keluarga Jokowi, yaitu Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka kala itu belum menjadi calon wakil presiden yang berkesempatan maju menjadi calon kepala daerah.

TEMPO

Suasana uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, 23 April 2024. **ANTARA/** Reno Esnir



PILKADA 2024

37 PROVINSI
508 KABUPATEN/KOTA
ANGGARAN: **RP 27 TRILIUN**
PERKIRAAN PEMILIH: **>204 JUTA ORANG**

JADWAL PILKADA

“Kalau pencalonan, kan terkait dengan politik, ya. Selama saya masih dinas, tak akan berbicara politik. Kecuali kalau saya sudah selesai.”

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Inspektur Jenderal
Ahmad Luthfi,
27 April 2024.

- **5 MEI-19 AGUSTUS 2024**
Pemenuhan syarat dukungan pasangan calon independen
- **24-26 AGUSTUS 2024**
Pengumuman pendaftaran pasangan calon
- **27-29 AGUSTUS 2024**
Pendaftaran pasangan calon
- **22 SEPTEMBER 2024**
Penetapan pasangan calon
- **25 SEPTEMBER-23 NOVEMBER 2024**
Masa kampanye
- **27 NOVEMBER 2024**
Pemungutan suara
- **27 NOVEMBER-16 DESEMBER 2024**
Penghitungan dan rekapitulasi suara

Gambar 4. 10 Infografis Tempo Jadwal Pilkada.

Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan fraksinya menolak revisi undang-undang pilkada karena pembahasannya terburu- buru. PKS pun menilai perlu ada jeda lebih panjang dari Pemilu 2024 ke pilkada agar kontestasi berjalan jujur dan adil. "Jangan sampai percepatan itu menurunkan kualitas kerja Komisi Pemilihan Umum," kata Mardani pada Selasa, 7 Mei 2024.

Pembahasan percepatan pelaksanaan pilkada 2024 meredup setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memastikan pilkada digelar pada 27 November 2024. Presiden Jokowi membantah jika Istana disebut berupaya mempercepat pelaksanaan pilkada. "Tidak ada yang namanya percepatan atau memajukan pilkada," ujar Jokowi di Karawang, Selasa, 7 Mei 2024.

Manuver Bobby Nasution Menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara

Ditulis Oleh:

Hussein Abri Dongoran, Defara Dhanya Paramitha, dan Mei Leandha



Gambar 4. 11 Musa Rajekshah (Tengah) Menyapa Warga Saat Menghadiri Acara Perpisahan Akhir Masa Jabatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, September 2023. Antara/Fransisco Carolio.

Sebelum halal bihalal Partai Golkar Sumatera Utara dimulai, Musa Rajekshah menerima tamu di salah satu ruangan di kantor partai beringin di Medan. Pada 27 April 2024 itu, para ketua Golkar kabupaten dan kota di Sumatera Utara menyampaikan dukungan kepada Musa, yang kerap disapa Ijeck, untuk maju sebagai calon gubernur. Musa, Ketua Golkar Sumatera Utara, dianggap lebih layak mendapatkan tiket dari Golkar ketimbang menantu Presiden Joko Widodo, Muhammad Bobby Afif Nasution.

"Karena Bang Ijeck kader Golkar, tak seperti Bobby," kata Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Golkar Sumatera Utara Riza Fakhumi Tahir menceritakan kembali pertemuan itu pada Rabu, 8 Mei 2024.

Seorang pengurus Golkar tingkat daerah yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengamini cerita Riza. Kepala daerah inkumben di salah satu kabupaten

ini bercerita, Musa dekat dengan pengurus Golkar provinsi. Selama menjabat Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023, Musa juga lancar berkomunikasi dengan rekan sesama partai.

Sokongan dari para kolega disambut Musa dengan tangan terbuka. Dalam halalbihalal, Musa lantas mengumumkan akan maju sebagai calon gubernur. Pentolan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila itu berkelakar bahwa dia tidak akan mau maju jika diajukan sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Sebelum halal bihalal Partai Golkar Sumatera Utara dimulai, Musa Rajekshah menerima tetamu di salah satu ruangan di kantor partai beringin di Medan. Pada 27 April 2024 itu, para ketua Golkar kabupaten dan kota di Sumatera Utara menyampaikan dukungan kepada Musa, yang kerap disapa Ijeck, untuk maju sebagai calon gubernur. Musa, Ketua Golkar Sumatera Utara, dianggap lebih layak mendapatkan tiket dari Golkar ketimbang menantu Presiden Joko Widodo, Muhammad Bobby Afif Nasution.

"Karena Bang Ijeck kader Golkar, tak seperti Bobby," kata Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Golkar Sumatera Utara Riza Fakhrumi Tahir menceritakan kembali pertemuan itu pada Rabu, 8 Mei 2024.



Gambar 4. 12 Bobby Nasution Menghadiri Acara Pengarahan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Partai Golkar di Kantor Partai Golkar, Jakarta, 6 April, 2024. Tempo/Yohanes Maharso.

Seorang pengurus Golkar tingkat daerah yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengamini cerita Riza. Kepala daerah inkumben di salah satu kabupaten ini bercerita, Musa dekat dengan pengurus Golkar provinsi. Selama menjabat Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023, Musa juga lancar berkomunikasi dengan rekan sesama partai.

Sokongan dari para kolega disambut Musa dengan tangan terbuka. Dalam halalbihalal, Musa lantas mengumumkan akan maju sebagai calon gubernur. Pentolan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila itu berkelakar bahwa dia tidak akan mau maju jika diajukan sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Utara. "Kan, sudah pernah jadi wakil gubernur," ujar Musa.

Rencana Musa bisa buyar jika partainya menjatuhkan pilihan kepada Bobby Nasution. Wali Kota Medan itu maju dalam pemilihan kepala daerah 2020 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kini suami Kahiyang Ayu itu telah keluar dari PDI Perjuangan dan sedang mendekati Golkar agar dicalonkan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Bobby, misalnya, terlihat menghadiri pembekalan calon kepala daerah di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar pada Sabtu, 6 April 2024. Saat itu Bobby hanya menjawab singkat pertanyaan wartawan mengenai rencananya maju sebagai calon gubernur. "Insyaallah," ucapnya. Musa tidak hadir dalam acara itu karena sedang berada di Jepang.

Relawan pendukung Bobby pun sudah mulai bergerak. Ketua Rumah Kolaborasi Bobby Nasution, Muhammad Asril, menuturkan, organisasinya mulai rutin menggelar diskusi mengenai langkah politik Bobby. Para pendukung juga sudah memasang reklame bergambar Bobby. "Pesannya mendorong Bang Bobby sebagai calon gubernur," kata Asril pada Kamis, 9 Mei 2024.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya telah memberikan surat penugasan kepada Bobby untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Surat yang sama diserahkan kepada Musa. Menurut Airlangga, sebelum memutuskan siapa yang bakal disorongkan, Golkar akan menilai peluang keduanya memenangi pemilihan. "Golkar akan melakukan evaluasi," ujarnya pada April 2024.

Di Sumatera Utara, Golkar bisa mengajukan sendiri calon gubernur dan calon wakilnya. Perolehan kursi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara hasil pemilihan legislatif 2024 meningkat dari 15 menjadi 22. Jumlah kursi itu melebihi syarat untuk ikut dalam pemilihan gubernur, yakni 20 persen dari jumlah kursi DPRD provinsi. Total kursi DPRD Sumatera Utara sebanyak 100 kursi halal bihalal Partai Golkar Sumatera Utara dimulai, Musa Rajekshah menerima tetamu di salah satu ruangan di kantor partai beringin di Medan. Pada 27 April 2024 itu, para ketua Golkar kabupaten dan kota di Sumatera Utara menyampaikan dukungan kepada Musa, yang kerap disapa Ijeck, untuk maju sebagai calon gubernur. Musa, Ketua Golkar Sumatera Utara, dianggap lebih layak mendapatkan tiket dari Golkar ketimbang menantu Presiden Joko Widodo, Muhammad Bobby Afif Nasution.

"Karena Bang Ijeck kader Golkar, tak seperti Bobby," kata Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Golkar Sumatera Utara Riza Fakhrumi Tahir menceritakan kembali pertemuan itu pada Rabu, 8 Mei 2024.

Seorang pengurus Golkar tingkat daerah yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengamini cerita Riza. Kepala daerah inkumben di salah satu kabupaten ini bercerita, Musa dekat dengan pengurus Golkar provinsi. Selama menjabat Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023, Musa juga lancar berkomunikasi dengan rekan sesama partai.

Sokongan dari para kolega disambut Musa dengan tangan terbuka. Dalam halalbihalal, Musa lantas mengumumkan akan maju sebagai calon gubernur. Pentolan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila itu berkelakar bahwa dia tidak akan mau maju jika diajukan sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Utara. "Kan, sudah pernah jadi wakil gubernur," ujar Musa.

Rencana Musa bisa buyar jika partainya menjatuhkan pilihan kepada Bobby Nasution. Wali Kota Medan itu maju dalam pemilihan kepala daerah 2020 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kini suami Kahiyang Ayu itu telah keluar dari PDI Perjuangan dan sedang mendekati Golkar agar dicalonkan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Bobby, misalnya, terlihat menghadiri pembekalan calon kepala daerah di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar pada Sabtu, 6 April 2024. Saat itu Bobby hanya menjawab singkat pertanyaan wartawan mengenai rencananya maju sebagai calon gubernur. "Insyaallah," ucapnya. Musa tidak hadir dalam acara itu karena sedang berada di Jepang.

Relawan pendukung Bobby pun sudah mulai bergerak. Ketua Rumah Kolaborasi Bobby Nasution, Muhammad Asril, menuturkan, organisasinya mulai rutin menggelar diskusi mengenai langkah politik Bobby. Para pendukung juga sudah memasang reklame bergambar Bobby. "Pesannya mendorong Bang Bobby sebagai calon gubernur," kata Asril pada Kamis, 9 Mei 2024.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya telah memberikan surat penugasan kepada Bobby untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Surat yang sama diserahkan kepada Musa. Menurut Airlangga, sebelum memutuskan siapa yang bakal disorongkan, Golkar akan menilai peluang keduanya memenangi pemilihan. "Golkar akan melakukan evaluasi," ujarnya pada April 2024.

Di Sumatera Utara, Golkar bisa mengajukan sendiri calon gubernur dan calon wakilnya. Perolehan kursi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara hasil pemilihan legislatif 2024 meningkat dari 15 menjadi 22. Jumlah kursi itu melebihi syarat untuk ikut dalam pemilihan gubernur, yakni 20 persen dari jumlah kursi DPRD provinsi. Total kursi DPRD Sumatera Utara sebanyak 100.

Pengurus Golkar Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir, mengungkapkan ada kegelisahan di dalam partainya menjelang pemilihan gubernur ini. Para pengurus, kata Riza, khawatir Jokowi akan campur tangan dalam pemberian rekomendasi partai kepada calon Gubernur Sumatera Utara. "Hari ini Golkar enggak nyaman dengan cawe-cawe," tutur ketua tim penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Golkar Sumatera Utara tersebut.

Riza juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah orang yang mengaku dekat dengan Bobby mulai bergerilya mendekati pengurus Golkar tingkat kabupaten dan kota. Menurut Riza, mereka menawarkan bantuan untuk mendapatkan surat rekomendasi Golkar dalam pemilihan bupati ataupun wali kota. "Bahkan ada yang gembar-gembor bisa membantu sampai kemenangan," ucap Riza.

Musa Rajekshah mengetahui manuver tersebut. Karena itu, kata Riza, Musa makin sering bertemu dengan pengurus partai beringin di daerah untuk membendung gerakan liar tersebut. Pada Selasa, 7 Mei 2024, Musa mengumpulkan sejumlah pengurus Golkar Sumatera Utara yang ingin maju sebagai calon kepala

daerah. Termasuk pengurus, total ada 243 orang yang mendaftar untuk maju sebagai calon kepala daerah dari Golkar.

Golkar Sumatera Utara juga akan menyeleksi calon kepala daerah dengan menggunakan lembaga survei. Setelah hasil survei keluar, barulah Golkar mengeluarkan surat rekomendasi bagi calon kepala daerah. Survei rencananya dilakukan tiga kali. Salah satunya dengan sigi menggunakan jasa lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Pendiri SMRC, Saiful Mujani, hadir dalam acara yang digalang Musa.

Adapun untuk memuluskan rencananya maju sebagai calon gubernur, Musa getol menemui pengurus Golkar pusat. Salah satunya Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa. Menurut Erwin, dalam pertemuan di sebuah kedai kopi di pusat belanja Plaza Senayan, Jakarta, pada akhir April 2024, ia dan Musa berdiskusi tentang pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Obrolan menyerempet kebutuhan logistik, siapa kandidat calon wakilnya, hingga soal Bobby Nasution. "Macam-macam diskusinya," ujar Erwin kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024.

Erwin juga membenarkan informasi bahwa Musa tak akan mau berhadapan dengan Bobby jika keduanya maju sebagai calon gubernur. "Bobby dan Ijeck itu berteman, hubungannya baik, saling menghargai," tuturnya.

Bobby Nasution belum merespons surat permintaan wawancara yang dikirimkan Tempo melalui orang dekatnya. Namun, kepada wartawan di Balai Kota Medan pada 16 April 2024, Bobby mengaku sudah menyampaikan niatnya kepada sejumlah partai untuk maju sebagai calon gubernur. "Partai melihat kinerja kita. Saya akan menyelesaikan tugas sebagai wali kota karena mereka melihat kinerja dulu," katanya.

Adapun Musa Rajekshah sempat mengatakan akan menjawab pertanyaan Tempo tentang langkahnya dalam pemilihan gubernur. "Nanti setelah saya selesaikan kegiatan," ujarnya pada 10 Mei 2024. Tapi, hingga tenggat, dia tak kunjung memberikan penjelasan.

Sebelumnya, dalam acara halal bihalal Golkar Sumatera Utara akhir bulan lalu, Musa mengatakan telah bertemu dengan Bobby sebelum abang ipar Gibran Rakabuming Raka itu berangkat umrah ke Arab Saudi. Musa menyampaikan, ia dan Bobby sepakat menjaga hubungan dan menerima apapun keputusan Golkar ihwal calon Gubernur Sumatera Utara. "Penugasan ini untuk kita berdua, tapi bukan menjadi persaingan ataupun perpecahan," katanya.

Mimpi Koalisi Permanen Partai Pendukung Pilkada 2024 Prabowo-Gibran Dalam Pilkada 2024

Ditulis Oleh:

Egi Adayatama, Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran, Erwan Hermawan, Defara Dhanya, dan Sultan Abdurrahman.



Gambar 4. 13 Kampanye Akbar Partai Demokrat di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, 1 Februari 2024. Antara/Galih Pradifita.

Menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Emil Dardak mengeluarkan instruksi khusus. Bertemu dengan pengurus cabang atau setingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur di Hotel Morazen, Surabaya, pada Jumat, 29 Maret 2024, Emil meminta mereka memprioritaskan koalisi dengan partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Partai-partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar. Dalam pemilihan presiden lalu, mereka tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. "Alasannya untuk memudahkan kami karena sudah ada chemistry dan hubungan baik dengan partai-partai itu," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Jombang Syarif Hidayatullah kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024.

Syarif langsung mengeksekusi arahan ini. Ia berkomunikasi dengan pengurus Gerindra dan Golkar di Jombang. Adapun PAN kehilangan semua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang dalam Pemilihan Umum 2024. Namun, hingga pekan lalu, belum ada kesepakatan soal calon yang akan diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran itu.

Dalam pemilihan Bupati Jombang 2018, Demokrat berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Gerindra. Saat itu mereka mengusung kader PPP, Mundjidah Wahab, yang menang dengan perolehan suara mencapai 48,3 persen. Sedangkan PAN dan Golkar mengusung Nyono Suharli Wihandoko-M. Subaidi.

Demokrat tak berencana mengusung kembali Mundjidah. Selain karena adanya instruksi untuk mendahulukan koalisi dengan partai pendukung Prabowo, Syarif menilai dukungan buat Mundjidah tak mendongkrak perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2019. "Perolehan suara Demokrat justru turun dan hanya dapat lima kursi, sedangkan PPP naik jadi tujuh kursi," ujar Syarif.

Namun Syarif menyebutkan instruksi dari Emil Dardak tak menjadi kewajiban. Pengurus Demokrat akan memperhatikan kondisi di daerah masing-masing sebelum memutuskan calon yang bakal diusung dalam pilkada 2024. Hingga Jumat malam, 10 Mei 2024, Emil-yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur-tak merespons pertanyaan dan panggilan telepon Tempo.

Seruan melanjutkan koalisi pilpres ke pilkada juga disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. "Partai Golkar menyatakan bahwa koalisi di daerah masing-masing, prioritas pertama tentu Koalisi Indonesia Maju," ucap Airlangga setelah memberikan arahan kepada semua bakal calon kepala daerah dari partai beringin pada Sabtu, 6 April 2024.

Airlangga meyakini koalisi permanen dengan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran akan membuat kemenangan mereka di pilkada bertambah. Namun ia tak menutup kemungkinan menjalin koalisi dengan partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Pranowo- Mahfud Md. Pengurus Golkar tetap memperhatikan kekuatan partai di tiap daerah.

Partai Amanat Nasional berkeinginan membentuk koalisi permanen. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Jumat, 10 Mei 2024, mengatakan partainya mengincar kemenangan besar di pilkada 2024. Namun ia menyatakan kondisi pilkada tak sama dengan Pemilu 2024. Karena itu, PAN tak mewajibkan koalisi permanen di daerah.

PAN justru ngebet terus berkoalisi dengan Partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengklaim partainya setia mendukung Prabowo dalam tiga pemilihan presiden, sejak 2014 hingga 2024. "Kami pokoknya terus beriringan dengan Gerindra," kata Zulkifli, Kamis, 9 Mei 2024.



Gambar 4. 14 Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Menghadiri Puncak Perayaan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Agustus 2023, Tempo/M Taufan Rengganis.

Menteri Perdagangan itu mengatakan partainya bakal berkoalisi dengan Gerindra di sejumlah daerah. Untuk pemilihan gubernur, misalnya, PAN akan berduet dengan Gerindra di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

Rencana koalisi permanen sudah diungkapkan oleh Prabowo Subianto sejak Koalisi Indonesia Maju terbentuk. Gagasan itu sempat dibahas di Tim Kampanye Strategis, tim pemenangan Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Pembentukan koalisi permanen bertujuan mempertahankan kemenangan dari pusat hingga daerah. Dua petinggi di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan koalisi permanen akan memperkuat pemerintahan baru yang mulai bekerja pada Oktober 2024. Adapun pilkada digelar pada 27 November 2024.

Namun narasumber yang sama menyebutkan, dalam berbagai diskusi di Koalisi Indonesia Maju, muncul keraguan koalisi permanen bisa terwujud. Tak mudah menyatukan kepentingan partai-partai di tingkat daerah. Apalagi partai-partai memiliki jagoan masing-masing dalam pilkada 2024.

Dalam sejarah pemilihan presiden, gagasan koalisi permanen berkali-kali muncul. Namun gagasan itu tak pernah terwujud. Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa mengatakan saat ini partai masih berfokus menjaring calon kepala daerah. Pembahasan soal koalisi baru dimulai setelah partai memastikan kandidat yang akan mereka usung.

Menurut Erwin, pilkada tidak hanya menjadi kepentingan partai politik. Di daerah, para kandidat pun melancarkan lobi politik untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. "Jadi kami tak bisa memaksakan," tutur Erwin, Kamis, 9 Mei 2024.

Di Jawa Tengah, bakal calon gubernur dari Partai Gerindra, Sudaryono, pun mengaku berkomunikasi dengan berbagai partai. "Sesuai dengan fatsun politik Pak Prabowo, tak ada istilah anti kepada siapa pun dan harus bisa bekerja sama dengan siapa pun," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jawa Tengah ini pada Ahad, 5 Mei 2024.

Gagasan membangun koalisi lanjutan pilpres juga muncul pada partai-partai pengusung Anies-Muhaimin, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan

Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun rencana kerja sama itu baru dibahas untuk beberapa daerah saja, seperti Aceh dan DKI Jakarta.

Di Aceh, Koalisi Perubahan meraih total 23 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Anies-Muhaimin juga menang telak di Aceh dengan raihan 2,6 juta suara, meninggalkan Prabowo-Gibran dengan 787 ribu suara dan Ganjar- Mahfud dengan 64,6 ribu suara. "Kami berharap kerjasama ini akan berlanjut (di pilkada Aceh)," ujar Muhaimin, Jumat, 3 Mei 2024.

Sedangkan untuk pilkada Jakarta, petinggi NasDem dan PKS telah mendiskusikannya dalam pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, pada Rabu, 23 April 2024. Dua partai itu sempat menyinggung kandidat potensial yang akan mereka usung. Salah satunya Anies Baswedan, yang kalah dalam pemilihan presiden. Namun Anies belum memastikan maju kembali atau tidak.

Meski belum diajak berdiskusi, PKB tak menutup pintu mendukung Anies Baswedan dalam pilkada 2024. Muhaimin menyatakan mendukung Anies untuk maju kembali di DKI. "Kalau Mas Anies mau maju jadi gubernur, saya pribadi akan dukung. Tapi datanya seperti apa, itu ada di DPP PKB," kata Muhaimin, Senin, 6 Mei 2024.

J. Koran Tempo

“BUAT APA DEWAN MEDIA SOSIAL”



Gambar 4. 15 Cover Koran Tempo Edisi Senin, 27 Mei 2024.

Buat Apa Dewan Media Sosial



Gambar 4. 16 Cover Buat Apa Dewan Media Sosial.

Pemerintah berencana membentuk Dewan Media Sosial sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa pengguna media sosial di ruang digital. Rencana itu segera memantik kecurigaan masyarakat sipil karena baru diagendakan saat ini. SAFEnet pernah mengusulkan pembentukan lembaga tersebut saat revisi UU ITE tahun lalu. Tapi pemerintah dan DPR menolaknya masuk dalam undang-undang. Ada apa?

Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial

Ditulis Oleh:
Andi Adam Faturahman & Francisca Christy Rosana.



Gambar 4. 17 Ilustrasi Media. Tempo/Jati Mahatmaji.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet Nenden Sekar Arum masih ingat ketika lembaganya pertama kali mengusulkan pembentukan dewan media sosial (DMS). SAFEnet mengusulkan pembentukan lembaga itu saat Mahfud Md. menjabat pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny Gerard Plate karena menjadi tersangka korupsi pada Mei tahun lalu.

Saat itu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga tengah membahas revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU). SAFEnet berharap lembaga yang akan menjadi mediator sengketa di media sosial tersebut dapat diakomodasi dalam revisi UU ITE.

"Namun revisi tersebut tidak memuat apa yang kami usulkan," kata Nenden kepada Tempo, Ahad, 26 Mei 2024.

Setelah itu, Nenden tak pernah mendapat kabar dari Kementerian Komunikasi mengenai usulan pembentukan dewan media sosial. "Sampai hari ini belum ada komunikasi lagi soal pembentukan dewan media sosial," katanya.

Belakangan Nenden terkejut ketika mengetahui Menteri Komunikasi Budi Arie Setiadi hendak membentuk lembaga tersebut. Ia pun khawatir keberadaan lembaga ini nantinya tidak sesuai dengan harapan awal SAFEnet saat diusulkan.

Sesuai dengan usulan SAFEnet, lembaga ini meminta pemerintah mempedomani enam prinsip dalam pembentukan dewan media sosial. Keenam prinsip tersebut adalah berskala nasional dan berkonteks lokal, mencakup perwakilan dari semua pemangku kepentingan, serta independen dari perusahaan media sosial.

Selanjutnya menerima keluhan dari pengguna individu hanya setelah semua kemungkinan menyelesaikan masalah dengan perusahaan media sosial habis; sanksi yang diberikan non-finansial dan non-pidana; serta bekerja untuk kepentingan umum, transparan, dan akuntabel kepada publik.

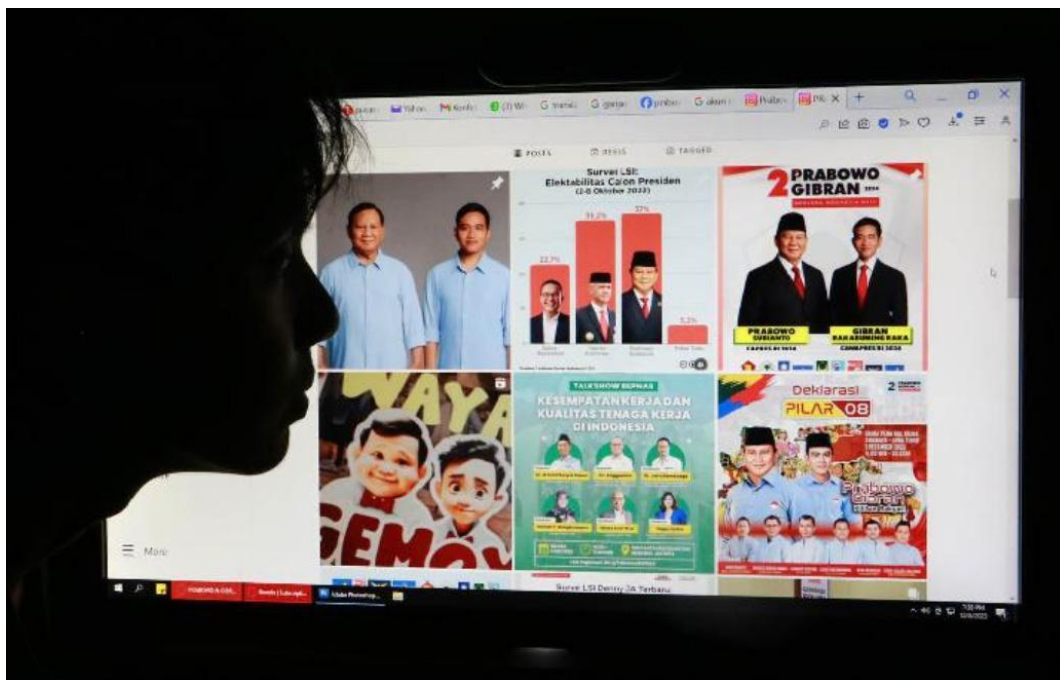
Di samping itu, SAFEnet menawarkan komposisi keanggotaan dewan media sosial yang terdiri atas enam unsur. Keenam unsur tersebut adalah akademisi, pemerintah, regulator media, pekerja media, industri periklanan, dan organisasi kemasyarakatan.

Mereka juga mengusulkan agar keberadaan dewan media sosial diakomodasi dalam UU ITE, yaitu pada Pasal 40 ayat 2c. Karena usulan ini tak diakomodasi dalam UU ITE, Nenden meminta Kementerian Komunikasi meninjau ulang pembentukan dewan media sosial tersebut. Alasannya, lembaga itu diusulkan menjadi solusi alternatif terhadap moderasi konten yang selama ini sarat kepentingan pemerintah serta memberikan ruang kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa di media sosial.

SAFEnet, UNESCO-lembaga PBB di bidang pendidikan dan kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, serta Center for Digital Society (CfDS) pernah mengkaji rencana pembentukan lembaga itu di Indonesia pada 2022. Nenden membenarkan

adanya pengkajian tersebut. Kajian keempat lembaga tersebut adalah mengusulkan adanya keterlibatan masyarakat sipil dan pihak berkepentingan lain untuk menangani serta menyelesaikan sengketa konten di media sosial yang dinilai bermasalah.

Namun, "Dengan situasi ini, kami khawatir pembentukan DMS rawan dikooptasi," ujar Nenden.



Gambar 4. 18 Konten Digital Pemilihan Presiden 2024 di Salah Satu Media Sosial, 8 Desember 2023, Tempo/Ijar Karim.

Saat ditemui di rumah dinasny pada Kamis pekan lalu, Menteri Komunikasi Budi Arie Setiadi mengatakan lembaganya akan membentuk dewan media sosial. Ia mengklaim rencana itu merujuk pada usulan SAFEnet serta kajian UNESCO.

Budi Arie mengatakan bentuk dewan media sosial akan serupa dengan Dewan Pers, yang berfungsi menyelesaikan sengketa pers. Dewan media sosial juga akan menjadi lembaga independen, yang anggotanya berasal dari berbagai pihak, antara lain organisasi masyarakat sipil, akademisi, pers, komunitas, ahli, praktisi, dan pelaku industri. "Kami menjamin kebebasan berpendapat," katanya.

Ketua Pro Joko Widodo (Projo)-tim pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019-itu mengatakan dewan media sosial akan menjadi mediator dalam berbagai persoalan sengketa di media sosial, termasuk konten yang terindikasi melanggar UU ITE. Dewan media sosial, kata dia, akan berupaya menjadi ruang awal untuk menyelesaikan persoalan sengketa media sosial.

"Jika terbentuk, DMS akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam tata kelola media sosial, termasuk memastikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang digital," katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar ragu posisi dewan media sosial akan serupa dengan Dewan Pers. Sebab, dasar hukum pembentukan Dewan Pers adalah UU Pers, sedangkan dewan media sosial tak diatur dalam undang-undang. Ia menduga lembaga itu nantinya berada di bawah pemerintah.

"Membentuk lembaga independen itu syaratnya dibentuk oleh undang-undang. Jika usulan dalam revisi kedua Undang-Undang ITE saja ditolak, bagaimana bisa dikatakan lembaga ini akan independen," kata Wahyudi.

Menurut Wahyudi, rencana Kementerian Komunikasi membentuk dewan media sosial justru patut dicurigai. Sebab, pemerintah maupun DPR sejak awal menolak keberadaan lembaga tersebut diakomodasi dalam UU ITE. "Saya membaca, revisi itu justru memperkuat kewenangan pemerintah dengan dalih memoderasi konten," katanya.

Wahyudi mengusulkan agar Kementerian Komunikasi membatalkan rencana pembentukan dewan media sosial. Ia justru menyarankan pemerintah membentuk panel konten di level platform agar konten termoderasi. Di sini peran pemerintah hanya menguji konten media sosial. "Proses penyelesaian sengketa tetap dilakukan pengguna dan platform. Ini tentu minim dari intervensi saat harus dilakukan pemutusan akses terhadap konten yang dianggap bermasalah," ujarnya.



Gambar 4. 19 Kepolisian Menunjukkan Bukti Akun Media Sosial Tersangka Kreator Propaganda dan Penyebaran Hoaks di Salah Satu Media Sosial di Gedung Humas Polri, Jakarta, 2019, Tempo/Hilman Fathurrahman W.

Mantan Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, mengatakan pemerintah mesti memperhatikan prinsip bahwa komposisi anggota dewan media sosial mencakup perwakilan seluruh pemangku kepentingan ketika hendak membentuk lembaga tersebut. "Prinsip lain yang tak kalah penting, DMS harus independen dan bekerja untuk kepentingan umum, transparan, serta akuntabel bagi publik," kata Damar.

Pengampu kelas politik digital ini berpendapat, Kementerian Komunikasi dapat merujuk Pasal 40 ayat 2d UU ITE dalam membentuk dewan media sosial. Pasal ini mengatur bahwa pemerintah berwenang mengatur penyelenggara sistem elektronik untuk memodernisasi konten terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau keselamatan individu atau masyarakat.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah membuat aturan turunan yang isinya melibatkan unsur masyarakat dalam mengelola konten di media sosial.

"Pertanyaannya, apakah pembentukan DMS di Indonesia ini akan mengikuti konsep seperti di kajian atau tidak," ujar Damar.

Bahaya Pembentukan Dewan Media Sosial

Ditulis Oleh:

Andi Adama Faturrahman & Francisca Christy Rosana



Gambar 4. 20 Seseorang Melintas di Depan Papan Yang Memuat Logo Platform Media Sosial di Jakarta, Oktober 2017. Reuters/Beawiharta.

Pegiat demokrasi dan masyarakat sipil mengkritik rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk dewan media sosial. Mereka khawatir keberadaan lembaga itu nantinya justru menjadi alat pemerintah untuk mengekang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat publik di media sosial.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan pembentukan lembaga ini patut diwaspadai karena berkelindan dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang isinya akan memberangus kebebasan pers. Ia juga khawatir lembaga itu nantinya justru menjadi alat pemerintah untuk membungkam kebebasan berekspresi publik.

"Publik dilarang kritis, baik di dunia nyata maupun dunia digital," katanya, Ahad, 26 Mei 2024.

Isnur pun tak percaya Kementerian Komunikasi akan betul-betul mengadopsi kajian Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), UNESCO- lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pendidikan dan kebudayaan- Universitas Gadjah Mada, serta Center for Digital Society (CfDS) pada 2022.

Ia beralasan, SAFEnet sudah mengusulkan pembentukan dewan media sosial saat revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun lalu. SAFEnet meminta lembaga itu masuk revisi UU ITE. Tapi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menolaknya.

Karena itu, Isnur ragu akan klaim Kementerian Komunikasi bahwa keberadaan dewan media sosial akan mengadopsi kajian SAFEnet dan UNESCO. Ia juga sanksi keberadaan dewan media sosial akan serupa dengan Dewan Pers sebagai lembaga independen. Sebab, dasar hukum pembentukan Dewan Pers adalah undang-undang. Sedangkan pijakan dewan media sosial kemungkinan besar bukan undang-undang.

"Jika undang-undangnya saja tidak ada, bagaimana bisa lembaga ini nantinya seperti Dewan Pers dengan posisi yang independen," kata Isnur.



Gambar 4. 21 Ilustrasi Pengguna Media Soisial, Reuters/Jonathan Raa/Sipa USA.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar berpendapat serupa. Ia mengatakan syarat membentuk lembaga independen adalah institusi tersebut harus diatur dan dibentuk melalui undang-undang. Selain itu, komposisi keanggotaan lembaga harus berasal dari non-pemerintah. "Jika lembaganya dibentuk dengan cara tidak independen, ini sama saja dengan memberikan peluang bagi pemerintah lebih powerfull," ujarnya.

Wahyudi mencontohkan beberapa kasus sengketa di media sosial, terutama mengenai konten yang dinilai pemerintah mengganggu kestabilan politik, hukum, dan keamanan. Pemerintah acapkali bertindak serampangan dengan menurunkan konten tersebut secara sepihak. Pemerintah juga melabelinya sebagai kebohongan.

Ia pun sanksi pemerintah betul-betul akan membentuk lembaga yang independen. Sebab, tidak ada aturan yang mewajibkan lembaga itu melibatkan unsur masyarakat dalam memoderasi konten. "Bisa jadi rencana membentuk dewan media sosial yang independen hanya menjadi angan - angan."

Menurut Wahyudi, jika dewan media sosial nantinya tak independen, upaya memoderasi konten di media sosial bisa menjadi dalih untuk memberangus kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Pemerintah akan mengatur seluruh tata kelola konten media sosial dengan dalih moderasi konten. "Ini upaya membatasi hak atas informasi bagi publik dengan membatasi konten yang dinilai mengganggu," ucapnya.

Rencana pembentukan dewan media sosial ini disampaikan Menteri Komunikasi dan informatika Budi Arie Setiadi, Kamis, 23 Mei lalu. Ia mengatakan tujuan pembentukan lembaga itu adalah memediasi sengketa di media sosial serta mengatur tata kelola konten di ruang digital. "Bentuknya independen sama seperti Dewan Pers," katanya.

Mantan Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, mengatakan keberadaan dewan media sosial bukan sesuatu yang baru dalam sejarah kebijakan Internet, Sebab, PBB justru adalah pihak pertama yang mendukung pembentukan lembaga tersebut di seluruh dunia.

Damar bercerita, konsep pembentukan dewan media sosial pertama kali diperkenalkan oleh pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, David Kaye, pada April 2018. Laporan Kaye itu mengusulkan adanya kerangka kerja untuk memoderasi konten online buatan pengguna yang berbasis pada hak asasi manusia. Di antara ide terbaik untuk program tersebut adalah membentuk dewan media sosial yang independen.

Kaye mengusulkan adanya mekanisme yang dapat mendengar keluhan pengguna individu dan mengumpulkan umpan balik dari publik tentang masalah moderasi konten, seperti penyensoran berlebihan. Lalu negara wajib mendukung mekanisme banding terukur secara konsisten dengan standar hak asasi manusia. "Jika mengacu pada konsep ini, pembentukan dewan media sosial tidak menjadi mudarat," kata Damar.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum berharap pemerintah berkoordinasi dengan kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain

lebih dulu sebelum membentuk dewan media sosial. Sebab, pembentukan lembaga tersebut saat ini menjadi tidak ideal setelah pemerintah menolak keberadaan dewan media sosial dalam UU ITE.

Menteri Komunikasi Budi Arie: Dewan Media Sosial Seperti Dewan Pers

Ditulis Oleh:
Francisca Christy Rosana



Gambar 4. 22 Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Rumah Dinas Kominfo, Senayan, Jakarta, 23 Mei 2024. Tempo/Feбри Angga Palguna.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membentuk dewan media sosial atau lembaga yang akan mengatur konten media sosial.

Menteri Kominfo Budi Arle Setiadi mengatakan lembaga ini akan berfungsi seperti Dewan Pers. Budi mengatakan dewan media sosial akan menjadi mediator apabila terjadi sengketa di media sosial.

Budi menyebutkan pembentukan dewan media sosial ini merupakan rekomendasi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dan dibahas dengan semua negara.

Wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, Raymundus Rikang, Sunudyantoro, dan Yosea Arga Pramudita mewawancarai Budi Arie untuk menggali lebih dalam soal dewan media sosial di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Kamis, 23 Mei 2024. Berikut ini petikannya.

Seperti apa bentuk dewan media sosial ini?

Dewan media sosial adalah lembaga mediasi dari masyarakat untuk menjadi mediator manakala terjadi dispute atau sengketa di media sosial. Bentuknya independen sama seperti Dewan Pers. Karena, mungkin, pada waktunya Dewan Pers juga punya keterbatasan untuk menjangkau hal itu. Ya, contohnya (similar) Total Politik atau Deddy Corbuzier yang bukan perusahaan jurnalistik. Banyak produk media sosial ini memang barang baru yang berbeda dari yang dijalankan oleh lembaga pers.

Apakah fungsinya seperti Dewan Pers?

Iya. Tapi ini yang ada di media sosial. Pada prinsipnya, ini lembaga mediasi di media sosial. Misalnya ada konten TikTok, masak, ke Dewan Pers? Dan tidak usah khawatir, dewan media sosial sama independennya seperti Dewan Pers. Karena di luar negeri, Eropa misalnya, dewan media sosial fungsinya, ya, mediasi-lah.

Apakah dalam praktiknya lembaga ini juga akan seperti Dewan Pers?

Iya, kan ada unsur akademikus, tokoh masyarakat, dan kami serius mengkaji ini. Karena UNESCO juga merekomendasikan ini, lembaga untuk mengatur dinamika media sosial.

Rekomendasi dari UNESCO ini hanya untuk Indonesia atau semua negara?

Semua negara. Ini UNESCO melakukan pengkajian, makanya namanya tidak ada pengawasan, ya, seperti Dewan Pers. Jadi, kalau dispute-dispute gitu, seperti yang tadinya tugasnya Dewan Pers, langsung saja larinya ke dewan media sosial.

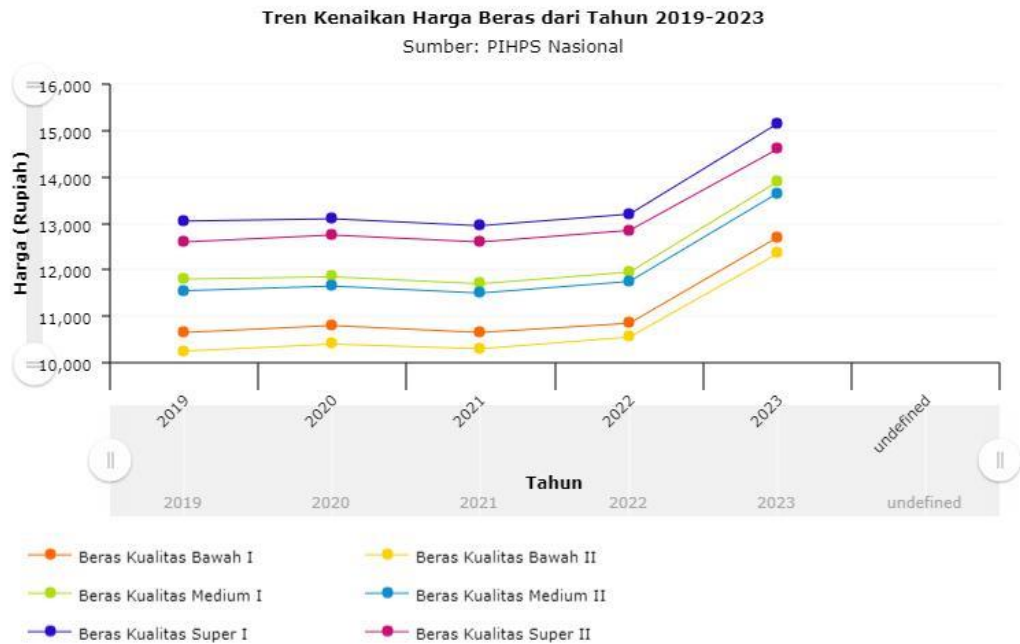
Sebagai sebuah rujukan, praktik yang sudah berjalan di Eropa seperti apa?

Ya, kami sedang mengkaji itu, beberapa negara sebagai benchmark. Eropa sudah, Inggris misalnya. Negara-negara Eropa sebagian besar sudah. Jadi, kalau ada apa-apa, masyarakat mau komplain misalnya, langsung dilempar ke situ.

K. Tempo Data Science

Harga Beras Kian Meroket dalam 5 Tahun Terakhir

Harga Komoditi/2023-09-27



Gambar 4. 23 Data Statistik. Sumber PIHPS Nasional.

Tren kenaikan harga beras di Indonesia telah menjadi perhatian utama selama lima tahun terakhir. Data yang diperoleh dari PIHPS Nasional, harga beras dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam berbagai kualitas beras. Hal ini dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan beras sebagai sumber utama karbohidrat.

Dari data di atas, kita dapat mengamati beberapa tren yang signifikan:

Kenaikan Konsisten: Harga beras hampir dalam semua kualitas mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, kecuali pada tahun 2021 yang menunjukkan sedikit penurunan sebelum kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023.

Kualitas Super Menonjol: Beras kualitas super (I dan II) selalu memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas lainnya. Peningkatan harga beras super lebih signifikan dibandingkan dengan yang lain.

Kualitas Medium dan Bawah: Meskipun harga beras medium dan bawah juga mengalami peningkatan, kenaikannya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan beras super.

Dampak Ekonomi: Kenaikan harga beras dapat memiliki dampak besar pada masyarakat yang bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Ini juga dapat mencerminkan tekanan inflasi di negara ini.

Dikutip dari laman Tempo.co, Ombudsman RI mengatakan ada tiga hal yang menjadi penyebab utama lonjakan harga beras. Ketiga penyebab harga beras mahal yakni permasalahan iklim, permasalahan di hulu, dan permasalahan di hilir. Menurut Ombudsman, sebenarnya masalah iklim tidak terlalu berdampak signifikan terhadap naiknya harga beras. Sebab, apabila di suatu daerah ada penurunan produksi akibat kekeringan, maka produksi beras masih bisa dipasok dari daerah lain. Kemudian untuk permasalahan di hulu, Ombudsman menemukan adanya luas lahan pertanian yang turun, keterbatasan sarana produksi pertanian serta masalah benih dan pupuk.

Terakhir, penyebab harga beras mahal menurut Ombudsman adalah permasalahan di hilir yang meliputi biaya komponen produksi naik, berkurangnya pasokan gabah dari petani, matinya penggilingan padi kecil, turunnya produksi beras hingga ketidakpastian impor beras. Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kenaikan harga beras. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk

meningkatkan produksi beras, mengendalikan biaya produksi, dan melindungi masyarakat yang rentan dari dampak kenaikan harga bahan makanan penting ini.

L. Analisis Framing William A. Gamson

Tabel E. Analisis Framing Berita I

Frame Sentral: Bagaimana Jokowi Membuka Jalan Bagi Orang Dekatnya Berlaga dalam Pilkada 2024 ?	
Framing Devices (Perangkat pembingkai)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
<p>Catchphrase</p> <p>Penggunaan kata “markas pemenangan kepala polda Jawa Tengah”, “baliho bertuliskan polda jateng hadir”, “kolega luthfi”, “lampu hijau keluarga istana”, “cawe-cawe” oleh Tempo.</p>	<p>Roots</p> <p>Pada Majalah Tempo berita pertama menjelaskan setidaknya ada beberapa orang terdekat presiden jokowi yang ingin maju pada pilkada 2024 dengan menggunakan power kekuasaan presiden jokowi</p>
<p>Depiction</p> <p>Tulisan “cawe-cawe dan dukungan” adalah gambaran terhadap ahmad luthfi didukung oleh jokowi maju di pilkada Jawa Tengah karena sudah membantu putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bertarung di pilpres 2024.</p>	<p>Appeals To Principle</p> <p>Pada berita pertama tempo ingin pembaca beritanya melihat kualitas politik dan demokrasi di Indonesia pada momen pilkada 2024.</p>
<p>Metaphors</p> <p>Penulisan “Istana menyiapkan tambahan bintang di pundak luthfi sebelum pilkada 2024”</p>	<p>Consequences</p> <p>Efek yang terjadi banyaknya orang-orang</p>

<p>(Perumpamaan atau pengandaian dengan cara merelasikan dua fakta melalui analogi atau memakai kata kiasan seperti ibarat, umpama, dan lain-lain)</p>	<p>terdekat jokowi ingin maju sebagai bupati atau gubernur yang berpotensi akan diikuti orang di bawahnya untuk mencapai kepentingan dan kekuasaan.</p>
<p style="text-align: center;">Exemplars</p> <p>Tokoh yang ditulis dalam berita ini seperti Ahmad Luthfi, Sendi, Agus Yunanto, Devid, Khofifah Indar Parawansa memiliki kedekatan pada partai-partai yang telah diusung juga serta memiliki kedekatan pada Jokowi untuk menang dan bersaing dengan lawannya di pilkada 2024</p>	
<p style="text-align: center;">Visual Images</p> 	



Tabel F. Analisis Framing Berita II


Frame Sentral: Manuver Bobby Nasution Menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara	
Framing Devices (Perangkat pembingkai)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
Catchphrase Penggunaan kata cawe-cawe dan sokongan dari para kolega kepada kandidat yang ingin maju di pilkada Sumatera Utara 2024	Appeals to principle Pembaca berita Majalah Tempo yang kedua soal cawe-cawe Jokowi di Sumatera Utara diajak untuk melihat situasi geopolitik di Sumatera Utara atas beberapa calon yang diusung oleh partai Golkar (Premis dasar atau klaim-klaim moral sebagai bentuk pembenaran dalam membangun berita)

<p style="text-align: center;">Depiction</p> <p>Penulisan dengan kata “Sokongan dari para kolega disambut Musa dengan tangan terbuka” yang menampakkan disini musa mendapatkan dukungan dari orang terdekat terutama partai golkar untuk maju di pilgub Sumatera Utara</p>	<p style="text-align: center;">Roots</p> <p>Berita ini menjelaskan bahwasanya akan diadakan pilkada di Sumatera Utara yang mana kandidat terkuatnya rata-rata dari partai golkar</p>
<p style="text-align: center;">Metaphors</p> <p>Penulisan pada kata “Rencana Musa bisa buyar jika partainya menjatuhkan pilihan kepada Bobby Nasution” yang mana buyar disini dimaksudkan jika partai golkar lebih mementingkan Bobby ketimbang musa, maka harapan musa maju di pilgub sumut 2024 tidak akan terjadi</p>	<p style="text-align: center;">Consequences</p> <p>Efek yang terjadi adanya kebingungan di internal partai golkar antara memilih kader dari mereka sendiri atau mengikuti cawe-cawe Jokowi yang mana Golkar merasa tidak enak dengan cawe-cawe yang dilontarkan</p>
<p style="text-align: center;">Exemplars</p> <p>Dilema yang terjadi pada internal partai golkar Sumatera Utara yang di satu sisi ingin mendeklarasikan Musa Rajekshah ketua umum partai golkar Sumatera Utara ketimbang Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara yang ingin lanjut ke periode berikutnya namun khawatir ada intervensi cawe-cawe dari Jokowi dalam pemberian rekomendasi pilkada Sumatera Utara</p>	
<p style="text-align: center;">Visual Images</p>	





Tabel G. Analisis Framing Berita III

Frame Sentral: Mimpi Koalisi Permanen Partai Pendukung Pilkada 2024 Prabowo-Gibran Dalam Pilkada 2024	
Framing Devices (Perangkat pembingkai)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
<p>Catchphrase</p> <p>Tulisan “alasanya untuk memudahkan kami karena sudah ada <i>chemistry</i> dan hubungan dengan partai-partai itu” yang mana partai yang dimaksud adalah partai Gerindra, partai Amanat Nasional, dan partai Golkar yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo-Gibran di pilpres 2024</p>	<p>Appeals to principle</p> <p>Pembentukan koalisi permanen di tingkat pilpres dan pilkada, namun mustahil terwujud di setiap daerah</p>
<p>Depiction</p> <p>“Dua petinggi di koalisi Indonesia Maju menyebutkan koalisi permanen akan memperkuat pemerintahan baru yang mulai bekerja pada Oktober 2024” digambarkan oleh Tempo koalisi Indonesia Maju mempertahankan kemenangan hingga ke pelosok daerah untuk mempengaruhi kekuatan politik di beberapa wilayah</p>	<p>Roots</p> <p>Pembentukan kerja sama melalui koalisi permanen untuk mempengaruhi kekuatan politik di tingkat pusat dan setiap daerah</p>

<p style="text-align: center;">Metaphors</p> <p>Penekanan kalimat pada “sesuai dengan fatsun politik pak prabowo, tak ada istilah anti kepada siapa pun dan harus bisa bekerja sama dengan siapa pun” artinya dalam berita ini mengatakan bahwa prabowo mempunyai ideologi untuk menyatukan semua elemen dan lawan politiknya membangun negeri</p>	<p style="text-align: center;">Consequences</p> <p>Efek dalam pemingkaian pada berita ini memberikan kita pandangan terhadap pergerakan partai politik yang tergabung dalam koalisi, yang bertujuan menancapkan kekuatannya</p>
<p style="text-align: center;">Exemplars</p> <p>Adanya beberapa partai yang telah disebutkan oleh Tempo seperti Partai gerindra, partai amanat nasional, dan partai golkar ingin mempermanenkan kerja sama dalam koalisi Indonesia maju di pilpres dan pilkada 2024. Walaupun kerja sama akan sangat berpotensi di pilpres, namun akan sangat mustahil koalisi permanen di tingkat pilkada dikarenakan partai di setiap daerah mempunyai kepentingan dan keputusan yang berbeda dengan tingkat pusat partainya masing-masing</p>	
<p style="text-align: center;">Visual Images</p> 	

Tabel H. Analisis Framing Berita IV

Frame Sentral: Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial	
Framing Devices (Perangkat pembingkai)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
<p>Catchphrase</p> <p>Penulisan kalimat “non-finansial, non-pidana, regulator media” yang menggambarkan tentang lika-liku pembentukan dewan media sosial</p>	<p>Appeals to principle</p> <p>Pembentukan dewan media sosial yang bertujuan untuk mengawasi kegiatan media di tingkat pers dan media sosial itu sendiri oleh kementerian komunikasi dan informatika</p>
<p>Depiction</p> <p>Tulisan pada kalimat “dengan situasi ini, kami khawatir pembentukan DMS rawan dikooptasi” yang dimaksudkan dewan media sosial sangat bahaya terbentuk jika tanpa adanya proses pertemuan atau perundingan pembentukan di awalnya yang rawan disalahgunakan demi kepentingan sekelompok orang</p>	<p>Roots</p> <p>Akibat dari perencanaan pembentukan dewan media sosial oleh kemenkominfo, dikhawatirkan lembaga itu berdiri atas dasar kepentingan beberapa pihak dan terkesan tergesa-gesa yang tidak dikomunikasikan bersama masyarakat dan beberapa pihak lainnya</p>
<p>Metaphors</p> <p>Disebutkan dalam kalimat “jika terbentuk, DMS akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam tata kelola media sosial” yang menggambarkan dewan media sosial akan menjadi media untuk kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang diakuisisi oleh menteri komunikasi dan informatika</p>	<p>Consequences</p> <p>Melihat efek yang ditimbulkan oleh pembentukan dewan media sosial ini, banyak beberapa penolakan dari beberapa pihak serta harus dikaji ulang untuk kemaslahatan bersama agar tidak merugikan kebebasan bermedia sosial dan</p>

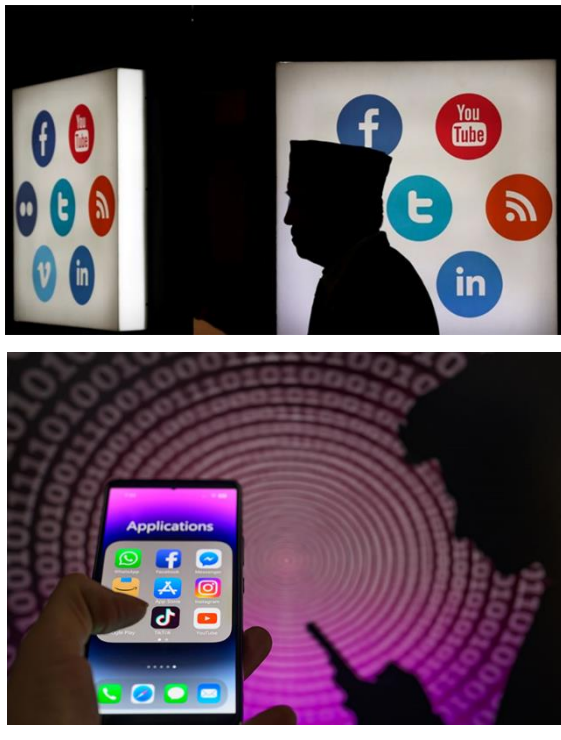
	kebebasan berpendapat di ruang digital
<p style="text-align: center;">Exemplars</p> <p>Dilemma pembentukan DMS oleh Kemenkominfo yang dianggap menjadi solusi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di media sosial yang belum dianggap aman oleh banyak orang dikarenakan belum memiliki keterlibatan terhadap masyarakat sipil dan pihak yang berkepentingan serta rawan kooptasi di awal pembentukannya</p>	
<p style="text-align: center;">Visual Images</p>  	

Tabel I. Analisis Framing Berita V

Frame Sentral: Bahaya Pembentukan Dewan Media Sosial	
Framing Devices (Perangkat pembedaan)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
<p>Catchphrase</p> <p>“Jika lembaga dibentuk dengan cara tidak independen, ini sama saja dengan memberikan peluang bagi pemerintah lebih <i>powerfull</i>” tulisan ini dimaksudkan dewan media sosial rentan penyalahgunaan oleh penguasa atas kritik yang dilontarkan oleh masyarakat dan lembaga pers</p>	<p>Appeals to principle</p> <p>Pembentukan Dewan Media Sosial yang dikhawatirkan memberangus kebebasan pers dan kebebasan berpendapat</p>
<p>Depiction</p> <p>Pembentukan dewan media sosial oleh kementerian komunikasi dan informatika dibentuk dengan alasan untuk menjaga kestabilan politik, hukum, dan keamanan di dunia maya namun dikhawatirkan akan menjadi pemberangusan kebebasan berpendapat</p>	<p>Roots</p> <p>Khawatir akan pembentukan dewan media sosial diakibatkan banyaknya pasal karet dan tidak ada undang-undang di dewan media sosial</p>
<p>Metaphors</p> <p>Dewan media sosial yang dibentuk dengan independen alias berdiri sendiri untuk membatasi konten-konten yang tidak sesuai namun tidak mempunyai landasan hukum dan undang-undang yang berlaku atas dasar pembentukan lembaga dewan media sosial</p>	<p>Consequences</p> <p>Efek yang didapatkan jika pembentukan dewan media sosial akan sangat banyak kritikan yang dibungkam dan kurangnya tulisan-tulisan kritis oleh pers sebagai pilar demokrasi</p>
Exemplars	

Pembentukan dewan media sosial mempunyai tujuan yang mulia untuk menjaga serta membatasi konten negatif namun terdapat banyak pasal-pasal karet dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas

Visual Images



Tabel J. Analisis Framing Berita VI

Frame Sentral: Menteri Komunikasi Budi Arie: Dewan Media Sosial Seperti Dewan Pers	
Framing Devices (Perangkat pembingkai)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
Catchphrase “Dewan media sosial adalah lembaga mediasi dari masyarakat untuk menjadi mediator manakala terjadi <i>dispute</i> atau	Appeals to principle Pembentukan dewan media sosial yang difungsikan seperti dewan

<p>sengketa di media sosial” yang maksud dari tulisan ini dewan media sosial diharapkan menjadi seperti dewan pers yang berfungsi mengawasi tugas lembaga pers</p>	<p>pers untuk mengatasi sengketa di media sosial</p>
<p>Depiction</p> <p>Pembentukan dewan media sosial bertujuan untuk mencegah <i>dispute</i> atau sengketa permasalahan yang terjadi di media sosial</p>	<p>Roots</p> <p>Dewan media sosial hadir untuk mengawasi segala pergerakan di media sosial jika terjadi sengketa atau permasalahan yang melanggar hukum di mata pemerintah</p>
<p>Metaphors</p> <p>Diharapkan dapat mengawasi konten media sosial yang dapat mengganggu kestabilan hukum dan politik seperti pencemaran nama baik</p>	<p>Consequences</p> <p>Efek yang didapatkan adalah semua media sosial seperti instagram, youtube, tiktok, dll mendapatkan pengawasan segala isi konten yang diawasi oleh dewan media sosial yang dikhawatirkan akan memberangus kekritisian masyarakat di media sosial</p>
<p>Exemplars</p> <p>Berbagai pertanyaan yang dilempar kepada budi arie selaku menteri komunikasi dan informatika terkait apa saja alasan dan landasan pembentukan dewan media sosial yang diisi oleh tokoh akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dll</p>	
<p>Visual Images</p>	



Tabel K. Analisis Framing Berita VII

Frame Sentral: Harga Beras Kian Meroket dalam 5 Tahun Terakhir	
Framing Devices (Perangkat pembingkai)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
<p>Catchphrase</p> <p>“Kualitas super menonjol” adalah gambaran melalui tulisan yang menarik perhatian untuk menggambarkan kualitas beras super I dan super II yang paling tinggi diantara klaster beras lainnya</p>	<p>Appeals to principle</p> <p>Kenaikan harga beras dari tahun 2019 sampai 2023</p>
<p>Depiction</p> <p>Ombudsman RI melihat tiga faktor mengapa lonjakan harga beras begitu drastis naik yaitu permasalahan di iklim, hilir, hulu serta perluasan lahan pertanian yang turun</p>	<p>Roots</p> <p>Kenaikan harga beras ini dikarenakan adanya permasalahan iklim, di hulu, dan di hilir</p>
<p>Metaphors</p> <p>Dalam hal ini Ombudsman RI menyarankan pemangku jabatan perlu mencari solusi jalan keluar dari permasalahan naiknya harga beras</p>	<p>Consequences</p> <p>Efek yang terjadi produksi yang kurang dikarenakan kekeringan bersamaan dengan keterbatasan sarana produksi pertanian dan masalah benih dan pupuk.</p>

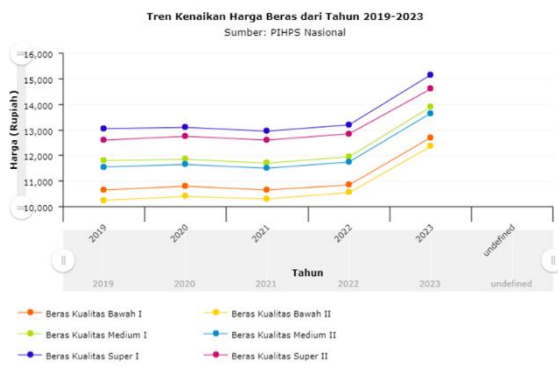
Berakibat naiknya harga beras di setiap daerah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

Exemplars

Terjadinya lonjakan harga beras yang disebabkan oleh faktor iklim, hulu, dan hilir serta berbagai permasalahan lainnya.

Maka dari itu Ombudsman RI menyarankan pemangku jabatan atau pemerintah meningkatkan produksi beras serta mengendalikan biaya produksi yang berhubungan dengan beras sehingga masyarakat terlindungi dari kenaikan harga beras

Visual Images



M. Peran Tempo Dalam Pandangan Republikanisme

Berdasarkan hasil penelitian diatas, telah didapatkan bahwasanya Tempo.co adalah jurnalistik yang bagian dari komunikasi massa yang bentuk komunikasinya melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet.³⁵ menggunakan teknik jurnalisme konstruktif sebagai bentuk ciri khas tempo.co dalam menampilkan pandangan Republikanisme pada perusahaan jurnalistik. Jurnalisme konstruktif adalah jurnalisme yang berpartisipasi pada tatanan demokrasi melalui peran kritis dan sebagai *watchdog* atau pengawas media untuk menemukan solusi yang relevan atas berbagai problem yang mereka hadapi di lapangan.³⁶ Tiga pilar jurnalisme konstruktif berpegang teguh pada fokus solusi yang dicapai, menyiarkan konteks dan nuansa, serta mempromosikan tatanan demokrasi.

Hasil temuan penelitian melalui tiga serangkaian karya jurnalistik Tempo.co yaitu majalah tempo, koran tempo, dan tempo data science dijabarkan sebagai berikut:

1. Majalah Tempo dengan judul “DINASTI TANPA HENTI” beserta isi beritanya “BAGAIMANA JOKOWI MEMBUKA JALAN BAGI ORANG DEKATNYA BERLAGA DALAM PILKADA 2024 ?”, “Manuver Bobby Nasution Menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara”, dan “Mimpi Koalisi Permanen Partai Pendukung Pilkada 2024 Prabowo-Gibran Dalam Pilkada 2024” adalah bagaimana Tempo.co menggambarkan suasana pemilihan umum dengan segala drama dan cerita dibaliknya. Tersiarinya nuansa politik yang bergejolak di beberapa daerah adalah hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang didapatkan dan hak memilih pemimpin di kemudian hari untuk menjadikan setiap daerah di tempatkan

³⁵McQuail, D. McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.). (London: Sage Publications. 2010). Hal 15-25.

³⁶Slamet Blog. 2024. <https://slamet.web.id/tempo-menggelar-pelatihan-jurnalisme-konstruktif/>

mereka menjadi lebih baik dan harus bertumpu pada rakyat. Terlebih dijelaskan dalam pandangan Republikanisme, kasus yang terjadi jika di dalam nuansa pemilihan umum selalu harus waspada yang namanya otoritarianisme. Sebutan untuk kepemimpinan yang bersifat keras dan mengekang kebebasan berpendapat pada rakyatnya, sehingga demokrasi adalah momentum yang pas membelenggu konsep otoritarianisme.³⁷ Republikanisme berpandangan dalam hal ini menurut tokoh Republik Rousseau. Rakyat adalah kedaulatan tinggi untuk bebas memilih dan berpartisipasi politik dalam memilih pemimpin mereka demi kepentingan bersama dan wilayah yang ingin dibangun dengan kritik dan saran pada setiap rentetan pilkada melalui kebebasan berpendapat. Maka dari itu demokrasi diminta untuk naik ke permukaan sebagai solusi dan solusi melalui jurnalisme konstruktif pada berita di majalah tempo adalah jendela bagi masyarakat meraih informasi.

2. Koran tempo dengan judulnya “BUAT APA DEWAN MEDIA SOSIAL” beserta isi beritanya “Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial”, “Bahaya Pembentukan Dewan Media Sosial”, dan “Menteri Komunikasi Budi Arie: Dewan Media Sosial Seperti Dewan Pers” adalah peran tempo.co mewujudkan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers secara lembaga melalui media sosial. Ketika terbitnya UU ITE serta pembentukan Dewan Media Sosial yang digadang-gadang akan mengawasi segala bentuk kegiatan yang negatif nyatanya banyak pihak yang menilai kedua elemen tersebut ditakutkan akan melahirkan pembatasan terhadap kritikan terhadap penguasa. Ditambah pembentukan dewan media sosial masih belum ditemukan payung hukum atau dasar hukum mengapa

³⁷Robertus Robet. Republikanisme: Filsafat Politik Untuk Indonesia. (Serpong, Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri). hal. 95-96.

lembaga itu mau dibentuk, sejatinya dalam pembentukan lembaga atau undang-undang harus dilandasi dengan pengambilan keputusan bersama atau musyawarah mufakat agar kedua belah pihak bisa menerima serta menguntungkan satu sama lain demi tujuan bersama. Republikanisme berpandangan dalam hal ini menurut tokoh Republik Marchiavelli. Manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat. ketika ada kebijakan yang tidak melibatkan publik dan payung hukum yang tidak jelas, maka kebijaksanaan pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan lagi kebebasan berpendapat di dunia digital dan dilindungi oleh hukum. bukan harus mengekang kebebasan berpendapat itu melalui media sosial.³⁸

3. Tulisan dari berita Tempo Science Data yang berjudul “Harga Beras Kian Meroket dalam 5 Tahun Terakhir” adalah sebuah gambaran yang ingin disampaikan oleh Tempo.co bahwasanya Indonesia adalah negara agraris kaya akan penduduknya yang bekerja sebagai petani dalam memproduksi beras sebagai kebutuhan utama masyarakat. Namun yang terjadi pada pengumpulan data statistik tempo.co menunjukkan kenaikan harga beras di republik ini. Selain faktor iklim, Pemerintah seharusnya mengatur lagi kebijakan impor beras dari luar negeri demi meningkatkan kestabilan ekonomi yang merata. Republikanisme berpandangan dalam hal ini menurut tokoh Republik Aristoteles. Ada tiga hal agar masyarakat berpartisipasi dalam menyikapi kebijakan pemangku jabatan. keutamaan moral dalam mengingatkan pemangku jabatan untuk lebih bijak menurunkan harga beras agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya, partisipasi oleh masyarakat untuk

³⁸Ibid. hal 97.

memberikan kritik dan saran sebagai bentuk kebebasan berpendapat, pembangunan karakter dengan memfasilitasi para petani Indonesia agar petani mampu memproduksi beras dengan harga yang murah dan petani sejahtera atas pengabdianya kepada negara.